Depict Pristine Adi, M.Pd.

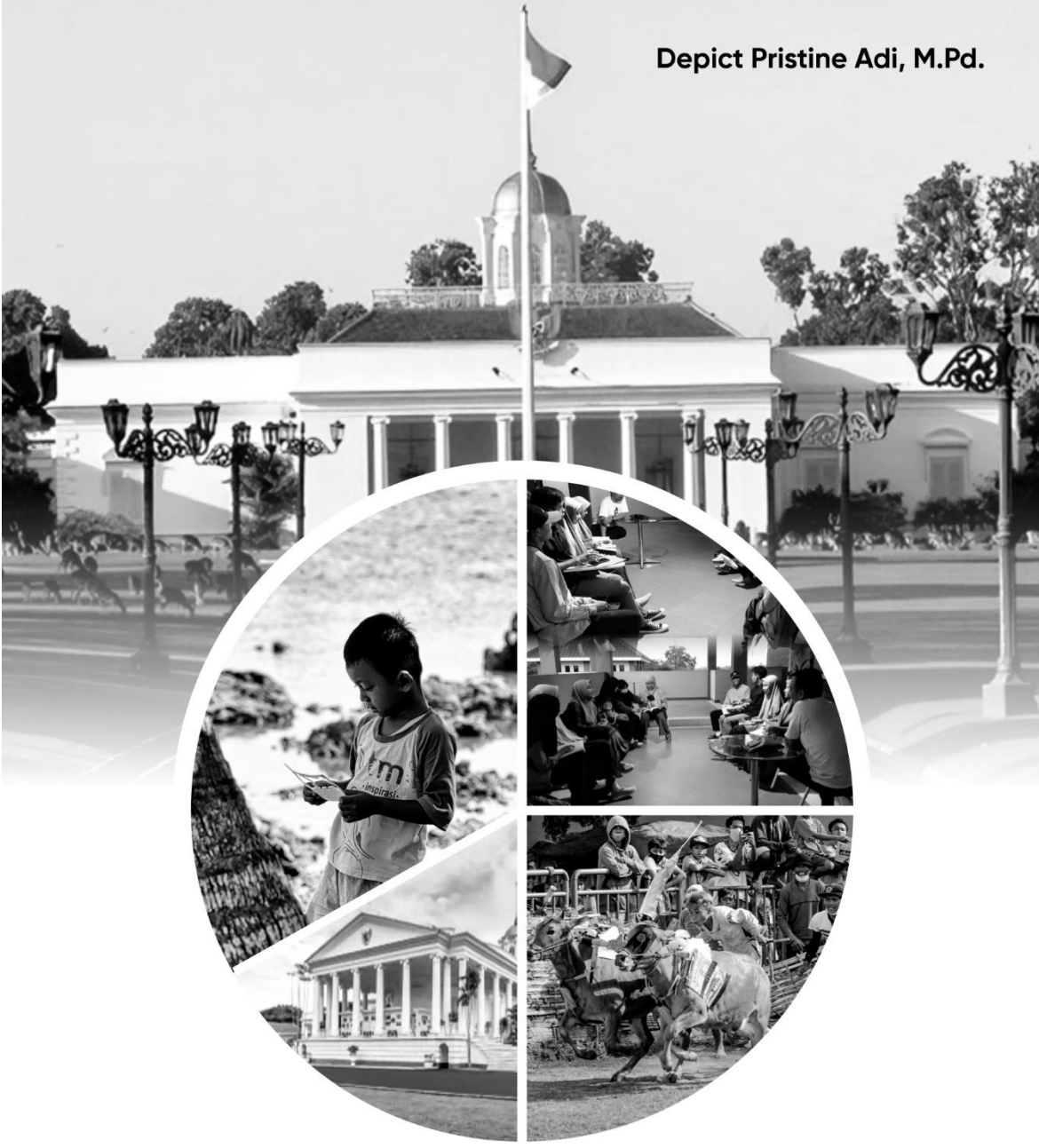

Individu, Masyarakat, dan Institusi *dalam* Pendidikan IPS

INDIVIDU, MASYARAKAT, DAN INSTITUSI DALAM PENDIDIKAN IPS

Depict Pristine Adi

Klik Media

INDIVIDU, MASYARAKAT, DAN INSTITUSI
DALAM PENDIDIKAN IPS

Depict Pristine Adi

ISBN: 978-623-363-380-2
QRCBN: 62-574-2276-497
Cetakan Pertama, Agustus 2022
Editor: Fakhriyatus Shofa Alawiyah
Layout & Desain Grafis: Haryono

Penerbit: Klik Media
Alamat Penerbit: Jl. Bromo 302 RT 01 RW 03 Kebonagung
Sukodono-Lumajang-Jawa Timur
085725104352

Hak Cipta © Dilindungi Undang-Undang. Dilarang
memperbanyak tanpa ijin penerbit dan penulis.

Kata Pengantar

Bismillah Walhamdulillah penulis haturkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan buku ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Pemahaman individu, masyarakat, dan institusi dalam Pendidikan IPS menjadi satu hal penting guna mencapai tujuan Pendidikan IPS. Salah satu tema NCSS dalam kajian IPS, individu, masyarakat, dan institusi termasuk dalam tema penting agar kegiatan yang pembelajaran dilakukan lebih bermakna. Pemahaman mendalam seorang manusia yang besikap sebagai individu hidup dalam lingkungan masyarakat dan tertata rapi oleh instusi menjadi sutu kesatuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa hasil penelitan, pendidik dan peseta didik dalam pelaksanaan pembelajaran belum mencerminkan tema individu, masyarakat, dan institusi dalam Pendidikan IPS. Pelaksanaan yang pembelajaran IPS yang terpadu dan tematik menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna karena setiap kejadian dalam kehidupan masyarakat dapat diberikan secara detail sesuai dengan fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Buku ini hadir untuk memaparkan tentang bagaimana konsep dasar individu, masyarakat, dan institusi hingga terbentuknya masyarakat informasi dan net generation post-industrial. Buku yang membahas tentang pemahaman individu, masyarakat, dan institusi jarang ditemui dipasaran. Oleh karena itu, melalui buku ini, penulis berusaha untuk memaparkan makna manusia sesungguhnya sebagai makhluk sosial.

Agar mudah dipahami oleh pembaca, pembahasan dalam buku ini dibagi sesuai dengan paradigma kerangka berfikir yang akademis dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama ini

membahas tentang konsep dasar manusia sebagai individu yang hidup di masyarakat, hubungan antara individu, masyarakat, dan institusi dan akuntabilitas individu, masyarakat, dan institusi. Pembahasan tentang proses sosial dalam masyarakat untuk membentuk kelompok sosial dan organisasi sosial dalam masyarakat. Kajian tentang sistem dan struktur sosial masyarakat diharapkan mampu memahamkan etika, nilai, dan norma masyarakat sesuai dengan fenomena sosial terbentuk stratifikasi sosial masyarakat. Pembagian tingkat kehidupan masyarakat menjadikan penulis memberikan telaah tentang pembedaan masyarakat perkotaan dan pedesaan yang mampu memberikan definisi tentang minoritas dan kemiskinan.

Bagian kedua membahas bagaimana pranata sosial dalam masyarakat dapat terbentuk secara alami dan buatan untuk melakukan pembatasan fenomena penyimpangan sosial dan melaksanakan pengendalian sosial dalam masyarakat. Terjadinya penyimpangan tersebut berawal dari perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sehingga mampu menumbuhkan organisasi masyarakat baik berupa tradisional maupun modern.

Bagian ketiga menitik beratkan pembahasan terkait masalah sosial dan peranan sosiologi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh munculnya masyarakat informasi dan net generation di era post-industrial.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pendidik, akademisi, peneliti, maupun praktisi di bidang Pendidikan IPS. Kehadiran buku ini diharapkan dapat melengkapi buku-buku lain yang berkaitan dengan Pendidikan IPS.

Terakhir, penulis sadar bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Buku ini pastinya belum sesempurna sesuai dengan harapan para pembaca. Karenanya, penulis berharap memperoleh saran dan kritik dari para pembaca dan professional guna perbaikan ke depannya

Jember, Agustus 2022
Depict Pristine Adi

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 Konsep Dasar Individu, Masyarakat, dan Institusi **1**

Konsep Individu 1

Konsep Masyakarat ..... **Error! Bookmark not defined.**

Konsep Institusi ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 2 Hubungan Individu, Masyarakat, dan Institusi ... **6**

Hubungan Individu dan Masyarakat 6

Hubungan Individu dan Institusi **Error! Bookmark not defined.**

Hubungan Masyarakat dan Institusi **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3 Akuntabilitas Individu, Masyarakat, dan Institusi **8**

Akuntabilitas dalam Individu 8

Akuntabilitas dalam Bermasyarakat **Error! Bookmark not defined.**

Akuntabilitas Institusi ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 4 Proses Sosial dalam Masyarakat **13**

Pengertian Proses Sosial 13

Pengertian Interaksi Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

Pola Interaksi Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

Ciri-Ciri Interaksi Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

Sifat Interaksi Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

Syarat Interaksi Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 5 Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial dalam Masyarakat **15**

Pengertian Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial dalam Masyarakat 15

Macam-macam Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial..... **Error! Bookmark not defined.**

Perbedaaan antara Kelompok dan Organisasi dalam Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 6 Sistem & Struktur Sosial Masyarakat 21

Sistem Sosial Masyarakat 21

Struktur Sosial Masyarakat..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 7 Stratifikasi Sosial Masyarakat..... 24

Sistem Stratifikasi sosial dalam masyarakat 24

Fungsi dan Dampak Stratifikasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 8 Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan 29

Pengertian Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan..... 29

Ciri-Ciri Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan**Error! Bookmark not defined.**

Pola Pikir Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gaya Hidup: Kajian Sifat dan Sifat Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 9 Masyarakat Minoritas dan Kemiskinan..... 32

Pengertian Masyarakat Minoritas..... 32

Pengertian Kemiskinan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hubungan Masyarakat, Minoritas dan Kemiskinan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 10 Studi Konflik dalam Individu, Masyarakat, dan Institusi 38

Pengertian Studi Konflik Individu, Masyarakat, dan Institusi... 38

Metode Penyelesaian Konflik ... **Error! Bookmark not defined.**

Pengertian Konflik Individu .... **Error! Bookmark not defined.**

Pengertian Konflik Masyarakat. **Error! Bookmark not defined.**

Resolusi Konflik di dalam Masyarakat**Error! Bookmark not defined.**

Jenis-Jenis Konflik Individu, Masyarakat, dan Institusi ..... **Error! Bookmark not defined.**

Faktor-Faktor Penyebab Konflik Individu, Masyarakat, dan Institusi ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 11 Pranata Sosial dalam Masyarakat 44

Pengertian Pranata Sosial dalam Masyarakat 44

Peran dan Fungsi Pranata Sosial**Error! Bookmark not defined.**

Penggolongan Pranata Sosial .... **Error! Bookmark not defined.**

Dampak Melanggar Pranata Sosial**Error! Bookmark not defined.**

BAB 12 Penyimpangan dan Pengendalian Sosial dalam Masyarakat 46

Pengertian Penyimpangan dan Pengendalian Sosial 46

Jenis-Jenis Penyimpangan dan Pengendalian Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

Ciri-ciri Penyimpangan Sosial ... **Error! Bookmark not defined.**

Bentuk Penyimpangan Sosial .... **Error! Bookmark not defined.**

Pengendalian Sosial..... **Error! Bookmark not defined.**

Penyebab Terjadinya Penyimpangan Sosial Di Masyarakat **Error! Bookmark not defined.**

BAB 13 Perubahan Sosial dan Budaya dalam Masyarakat 52

Pengertian Perubahan Sosial dan Budaya..... 52

Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Budaya**Error! Bookmark not defined.**

Faktor dan Dampak Penyebab Terjadinya perubahan Sosial dan Budaya ..... **Error! Bookmark not defined.**

Contoh Perubahan Sosial dan Budaya di Masyarakat..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 14 Organisasi Tradisional dan Modern 57

Pengertian Organisasi Tradisional dan Modern 57

Teori Organisasi Tradisional dan Modern**Error! Bookmark not defined.**

BAB 15 Masalah Sosial dan Peranan Sosiologi dalam Masyarakat 63

Pengertian masalah sosial dan sosiologi 63

Macam-macam masalah sosial yang ada di masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

Faktor Penyebab Masalah Sosial**Error! Bookmark not defined.**

Peranan sosiologi di masyarakat**Error! Bookmark not defined.**

Peran Sosiologi Bagi Masyarakat**Error! Bookmark not defined.**

BAB 16 Masyarakat Informasi dan Net Generation di Era Post-Industrial 68

Masyarakat Informasi Pasca-Industry (Post-Industrial) 68

Arti Penting Informasi pada Masyarakat Pasca Industri ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 74

BAB 1
Konsep Dasar Individu, Masyarakat, dan Institusi

Konsep Individu

1. Pengertian Individu

Berdialog tentang orang warga serta intuisi. Terlebih dahulu yang wajib kita paham merupakan penafsiran orang, warga serta intuisi. Manusia merupakan orang sosial yang wajib hidup ditengah area sosial. Manusia tidak bisa jadi hidup tanpa kelompok, malah kelompok sosial yang menjadikan manusia bisa berkembang serta tumbuh. Proses diawali semenjak dia dilahirkan hingga dia sanggup penuhi kebutuhannya sendiri. Manusia dalam persepektif psikologi terdiri dari 2 bagian, awal: manusia merupakan makhluk individual, maksudnya: manusia merupakan sesuatu totalitas yang tidak bisa dibagi-bagi, serta kedua: manusia merupakan makhluk individual yang tidak cuma dalam makna makhluk totalitas jiwa raga, namun dalam makna pula kalau masing-masing orang itu merupakan individu yang khas bagi corak keperibadiannya, tercantum kecakapan-kecakapannya sendiri.

Tiap orang dalam warga memiliki kedudukan (role) serta peran (status) yang berbeda. Kedudukan merupakan pola sikap yang diharapkan dari seorang yang memiliki posisi (status) tertentu. Sebaliknya peran (status) merupakan posisi seorang dalam kelompok. Mengingat tiap orang memiliki kepentingan yang bermacam-macam, hingga tiap orang memiliki kepentingan yang bermacam-macam, hingga tiap orang bisa berstatus serta berfungsi di kelompok cocok dengan kepentingan itu. Tiap orang tentu hendak hadapi pembuatan kepribadian ataupun karakter. Serta perihal itu memerlukan proses yang sangat panjang serta banyak aspek yang mempengaruhinya paling utama area keluarga. Perihal ini diakibatkan sebab keluarga merupakan saudara yang sangat dekat serta kita lebih banyak mengosongkan waktu dengan keluarga. Tiap keluarga tentu mempraktikkan sesuatu ketentuan ataupun norma yang mana norma-norma tersebut tentu hendak pengaruhi dalam perkembangan orang.

Bukan cuma dalam lingkup keluarga, tetapi dalam lingkup warga juga ada norma- norma yang wajib di patuhi serta perihal itu pula pengaruhi perkembangan orang.

Dengan insting yang dimiliki individu, dimana ia dapat melihat lingkungan sekitarnya, secara tidak langsung individu akan menilai apakah hal-hal yang ada disekitarnya benar atau salah, ketika seseorang berada dalam masyarakat dengan norma, jika norma tersebut berlaku, maka ketika norma-norma yang diterapkan Berpengaruh pada kepribadian ketika, misalnya, seseorang menerapkan aturan ketat dalam pengaturan masyarakat yang disiplin, maka itu pasti mempengaruhi kepribadian dari waktu ke waktu untuk menjadi orang yang disiplin. kepribadian, dan lingkungan keluarga. Misalnya seseorang berada dalam lingkungan keluarga yang religius, kemudian orang tersebut dibawa menjadi orang yang religius. Jadi jika kita ingin mempelajari individu, kita tidak akan pernah bisa lepas dari masalah masyarakat itu sendiri. Karena keduanya, individu dan masyarakat saling berhubungan.

Individu berasal dari bahasa latin "individuum" yang maksudnya yang tidak terbagi, serta menggambarkan kesatuan yang tidak terbatas. Sebutan tersebut merujuk pada sesuatu kesatuan yang sangat kecil serta terbatas. Sehingga dalam perihal ini, individu merupakan sesuatu kesatuan yang terbatas, merupakan sebagai manusia perseorangan bukan sebagai manusia totalitas. Artinya kalau manusia merupakan satu kesatuan jiwa serta raga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tiap manusia lahir ke dunia dengan bawa kemampuan diri tiap- tiap yang bisa dibesarkan setelah itu hari lewat proses belajar ataupun pembelajaran.

Individu bagi konsep sosiologis maksudnya manusia sebagai makhluk yang hidup berdiri sendiri serta tidak mempunyai kawan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai kelengkapan hidup berbentuk raga, rasa, rasio, serta rukun. Yang mana raga bisa dimaksud sebagai wujud jasad manusia yang khas yang bisa membedakan antar orang yang satu dengan orang yang lain walaupun dengan karakteristik serta hakikat yang sama. Rasa merupakan perasaan orang yang bisa menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta, semacam merasakan panas, dingin, ataupun merasakan santapan yang nikmat. Perasaan ini bisa dibesarkan jadi perasaan bahagia terhadap keelokan serta kebalikannya. Arti rasio ataupun ide pikiran merupakan kelengkapan manusia buat meningkatkan diri, menanggulangi seluruh suatu yang dibutuhkan dalam diri masing- masing orang. Sedangkan, rukun ataupun pergaulan hidup merupakan wujud sosialisasi dengan sesama

manusia serta hidup berdampingan satu dengan yang lain secara harmonis, damai serta bersama mencukupi. Rukun ini merupakan piranti hidup yang bisa membentuk sesuatu kelompok sosial yang sering diucap sebagai warga.

Individu menampilkan peran seseorang sebagai orang perorangan ataupun perseorangan, berkaitan dengan orang perbandingan individual perseorangan. Karakteristik dan watak ataupun ciri antara orang satu dengan yang lain berbeda-beda tidak lah sama. Perbandingan tersebut diucap perbandingan orang serta perbandingan individual. Bagi Lindgren (Lindgren, 1980) arti "arti perbandingan" serta "serta perbandingan individual" menyangkut tentang ragam yang terjalin, baik ragam pada aspek raga serta psikologis. Perbedaan individual bagi Chaplin (Chaplin, 2014) merupakan "sebarang watak ataupun perbandingan kualitatif dalam sesuatu watak, yang dapat membedakan satu orang dengan orang yang lain".

2. Macam-macam perbedaan individu

a. Perbedaan individu menurut status sosial ekonomi

Status sosial seseorang mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Penerimaan kawasan terhadap seseorang cenderung didasarkan pada status sosial ekonominya. Hingga bisa dikatakan orang yang status sosialnya besar hendak memiliki konsep diri yang lebih positif dibanding orang yang status sosialnya besar hendak memiliki konsep diri yang lebih positif dibanding orang yang status sosialnya rendah. Perihal ini didukung oleh riset Rosenberg terhadap kanak- kanak dari ekonomi sosial atas menampilkan kalau mereka mempunyai konsep diri yang besar dibanding dengan kanak- kanak yang berasal dari status ekonomi rendah. Hasilnya merupakan 51% anak dari ekonomi rendah mempunyai tingkatan konsep diri yang besar.

b. Perbedaan individu menurut etnik serta pengalaman sekolah

Konsep kalangan etnik ataupun suku bangsa didasarkan pada persamaan kebudayaan. Sebutan etnik bukan cuma menyangkut kelompok- kelompok ras, melainkan jua menyangkut kelompok- kelompok lain yang mempunyai asal-muasal yang sama, serta memiliki kaitan satu dengan yang lain dalam segi agama, bahasa, kebangsaan, asal daerah ataupun gabungan antar aspek yang satu dengan yang yang lain. Keberadaan kelompok etnik tersebut tidak selamanya permanen serta apalagi kilat sekali lenyap sebab terdapatnya

asimilasi serta amalgamasi. Sebaliknya pengalaman sekolah hendak membedakan tingkah laku, perkataan, serta metode bersosialisasi yang baik. Dengan pengalaman sekolah, mutu orang hendak lebih terlihat nampak. Misalnya etika, tingkah laku, serta perkataan.

c. Perbedaan individu bagi bahasa

Bahasa merupakan salah satu keahlian orang yang sangat berarti dalam kehidupan. Keahlian masing- masing orang dalam berbahasa berbeda- beda. Keahlian berbahasa merupakan keahlian seorang guna melaporkan buah pikirannya dalam wujud ungkapan kata serta kalimat yang penuh arti, logis serta sistematis. Keahlian berbahasa sangat dipengaruhi oleh aspek kecerdasan serta aspek lingkungan dan aspek raga (organ bicara).

d. Perbedaan individu bagi tipe kelamin serta gender

Sebutan tipe kelamin serta gender kerap dipertukarkan serta dikira sama. Tipe kelamin menunjuk pada perbandingan biologis dari pria serta wanita, sedangkan gender merupakan aspek psikososial dari pria serta wanita. Perbandingan gender tercantum kedudukan, tingkah laku, kecenderungan, watak serta atribut lain yang memaparkan makna jadi seseorang pria serta wanita dalam kebudayaan yang terdapat. Perbedaaan-perbedaaan tersebut timbul dari apa yang sudah diajarkan.

e. Perbedaan orang bagi intelegensi

Penafsiran intelegensi merujuk kepada gimana metode orang bertingkah laku, serta metode orang berperan. Sebaliknya intelegensi merupakan keahlian universal seorang dalam membongkar suatu permasalahan dengan kilat, pas serta gampang. Seorang dikatakan mempunyai sikap intelegen sekiranya dia mempunyai keahlian buat menguasai hal- hal berarti dari suasana yang dialami, serta sanggup membagikan pemecahan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Pengelompokan intelegensi didasarkan pada dimensi yang diketahui dengan Intelligence Quotient(IQ).

Intelegensi pengaruhi penyesuaian diri seorang terhadap area orang lain serta lingkungannya sendiri. Terus menjadi besar taraf intelegensinya terus menjadi baik penyesuaian dirinya serta lebih sanggup bereaksi terhadap rangsangan area ataupun orang lain dengan metode yang bisa diterima. Perihal ini dijelas hendak tingkatkan konsep dirinya, demikian pula kebalikannya. Seorang yang memiliki tingkatan pembelajaran yang besar hendak menaikkan prestasinya.

BAB 2
Hubungan Individu, Masyarakat, dan Institusi

Hubungan Individu dan Masyarakat

Berdialog tentang individu serta masyarakat. Terlebih dahulu yang wajib kita paham merupakan penafsiran dari orang serta penafsiran dari masyarakat itu sendiri. Individu merupakan satu orang ataupun seseorang manusia serta masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat. Orang serta masyarakat tidak bisa dipisahkan sebab tidak hendak terdapat kata masyarakat bila tidak terdapat orang serta orang itu sendiri merupakan pelaku di dalam sesuatu masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berhubungan, saling memerlukan satu sama lain. Tidak terdapat satupun orang yang dpat hidup tanpa orang yang lain. Meski seberapa banyak harta yang dipunyai oleh seseorang orang, itu sama sekali tidak berharga bila tidak terdapat orang lain ataupun dengan kata lain tidak terdapat interaksi sosial yang terjalin di antara orang ataupun masyarakat. Hingga dari itu, bila kita mau mengkaji tentang orang hingga kita tidak hendak sempat dapat lepas dari permasalahan masyarakat itu sendiri. Sebab keduanya, antara orang serta masyarakat saling keterkaitan satu sama yang lain.

Aspek individual merupakan aspek yang berasal dari dalam diri seorang. Aspek individual meliputi keinginan, keahlian, serta peluang orang tersebut. Dari ketiga tersebut merupakan prasyarat universal tumbuhnya partisipasi dalam bermasyarakat (Mujiburrahmad & Firmansyah, 2014).

Durkheim menegaskan jika individu, entah sedang berperan sebagai agen ataupun objek, tidak bisa jadi jadi tolak ukur‘ nilai moral sikap’, sebab nilai moral berasal dari‘ sumber yang lebih besar’ merupakan, masyarakat,‘ kolektif sui generasi yang dibangun oleh pluralitas individu-individu terpaut untuk membentuk suatu

kelompok. Masyarakat untuk Durkheim merupakan suatu‘ kekuatan moral’ lebih berarti daripada orang, serta merupakan‘ sumber serta penjaga peradaban’. Masyarakat merupakan kenyataan tempat asal mengalirnya seluruh suatu yang berarti untuk kita (Ritzer, 2012).

Agar ikatan antar manusia didalam sesuatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut tercipta secara tidak terencana, tetapi lama-kelamaan norma-norma tersebut terbuat secara sadar. Misalnya, dulu didalam jual-beli, seseorang perantara tidak wajib diberi bagian keuntungan. Hendak namun, lama kelamaan terjalin Kerutinan kalau perantara wajib menemukan bagiannya, dimana sekalian diresmikan siapa yang menanggung itu, pembeli ataupun penjual. Norma-norma yang terdapat didalam masyarakat, memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang lemah, yang lagi hingga yang terkuat energi ikatnya (Nasikun, 2008).

BAB 3
Akuntabilitas Individu, Masyarakat, dan Institusi

Akuntabilitas dalam Individu

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban tiap orang, kelompok ataupun institusi buat penuhi tanggung jawab yang jadi amanahnya. Amanah seseorang orang sebagai pegawai merupakan menjamin terwujudnya nilai- nilai publik. Nilai- nilai publik tersebut antara lain:

1. Sanggup mengambil opsi yang tepat serta benar kala terjalin konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan zona, kelompok, serta individu.
2. Mempunyai uraian serta pemahaman buat menjauhi serta menghindari keterlibatan PNS dalam politik praktis.
3. Memperlakukan masyarakat negeri secara sama serta adil dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
4. Membuktikan perilaku serta sikap yang tidak berubah-ubah serta bisa diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Aspek-aspek akuntabilitas: Akuntabilitas merupakan suatu ikatan *(Accountability is a relationship)*. Ikatan yang diartikan merupakan ikatan 2 pihak antara orang/kelompok/institusi dengan negeri serta masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab membagikan arahan yang mencukupi, tutorial, serta mengalokasikan sumber daya cocok dengan tugas serta gunanya. Akuntabilitas berorientasi pada hasil *(Accountability is results oriented)*. Dalam konteks ini, tiap orang/kelompok/institusi dituntut buat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya, dan senantiasa berperan serta berupaya buat membagikan donasi buat menggapai hasil yang optimal. Akuntabilitas memerlukan terdapatnya laporan *(Accountability requires reporting)*. Laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Dengan membagikan laporan kinerja berarti sanggup menerangkan terhadap aksi serta hasil yang sudah

dicapai oleh orang/kelompok/institusi, dan sanggup membagikan fakta nyata dari hasil serta proses yang sudah dilaksanakan.

Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi *(Accountability is meaningless without consequences).* Akuntabilitas merupakan kewajiban. Kewajiban menampilkan tanggung jawab, serta tanggung jawab menciptakan konsekuensi. Konsekuensi tersebut bisa berbentuk penghargaan ataupun sanksi. Akuntabilitas membetulkan kinerja *(Accountability improves performance)*. (Jurnal akuntansi & auditing Indonesia, 2017). Tujuan utama dari akuntabilitas merupakan buat membetulkan kinerja pegawai dalam membagikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif *(proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai suatu ikatan serta proses yang direncanakan buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan semenjak dini, penempatan sumber energi yang pas, serta penilaian kinerja.

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu:

1. Untuk sediakan kontrol demokratis (kedudukan demokrasi); dengan membangun sesuatu sistem yang mengaitkan stakeholders serta pengguna yang lebih luas (tercantum masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif serta di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkatan kementrian, lembaga ataupun wilayah).
2. Untuk menghindari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan (kedudukan konstitusional).
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas orang mengacu pada ikatan antara orang serta lingkungan kerjanya, merupakan antara pegawai dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab buat membagikan arahan yang mencukupi, tutorial, serta sumber energi dan melenyapkan hambatan kinerja, sebaliknya PNS sebagai aparatur negeri bertanggungjawab buat penuhi tanggungjawabnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/ agent) buat membagikan pertanggungjawaban, menyajikan, memberi tahu, serta mengatakan

seluruh kegiatan serta aktivitas yang jadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/ principal) yang mempunyai hak serta kewenangan buat memohon pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja individual bisa dimaksud sebagai tingkatan keberhasilan seorang secara totalitas sepanjang periode tertentu dalam melakukan tugas yang sudah ditargetkan. Kinerja individual merupakan keahlian orang buat melaksanakan suatu dengan sukses serta efesien pada suatu industri (Jayantara & Dharmadiaksa, 2016).

Menurut Setiana serta Yuliani (2017:206) transaparansi merupakan membagikan data keuangan yang terbuka serta jujur pada masyarakat bersumber pada pertimbangan kalau masyarakat mempunyai hak buat mengenali secara terbuka serta merata atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaaan sumber energi yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Poae dan Saerang (2013:29) transparan merupakan sesuatu kebebasan mengakses kegiatan politik serta ekonomi pemerintah serta keputusan-keputusannya. Menurut Wisnawati, dkk (2018) Pengelolaan Dana Desa wajib bersumber pada pada prinsip-prinsip penerapan yang transparan serta terbuka, kedudukan aktif masyarakat mulai dari proses perencanaa, penerapan, pengawasan serta pemeliharaan, pelakasanaan aktivitas yang bisa di pertanggungjawabkan secara admininstratif, teknis serta hukum, kenaikan guna kedudukan lembaga kemasyarakatan, serta pelestarian aktivitas yang dibesarkan secara berkepanjangan lewat partisipasi masyarakat. Pemakaian Dana Desa dipecah jadi 2 bagian, merupakan buat penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% serta sebesar 70% buat pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan: "Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa serta aparatnya buat membagikan pertanggungjawaban, menyajikan, memberi tahu serta mengatakan seluruh kegiatan serta aktivitas yang jadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai hak serta kewenangan buat pertanggungjawaban tersebut". Menurut Program

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya;
2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya;
3. Bisa dikendalikan, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan;
4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada;
5. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

Sistem pengukuran kinerja ini wajib dilaksanakan secara sistematis serta berkesinambungan buat menghasilkan pengelolaan organisasi yang maksimal, bersih, serta bertanggung jawab (Ahyaruddin dan Akbar 2018). Christensen dan Lægreid (2014) mengemukakan kalau sistem pengukuran kinerja yang dijalankan dengan baik serta cocok oleh pemerintah hendak lebih mudah dalam melaksanakan efisiensi serta efektifitas layanan publik, dan alokasi sumber daya serta pembuatan keputusan yang pada kesimpulannya bisa tingkatkan akuntabilitas serta kinerja organisasi. Namun, Nurkhamid (2008) mengatakan kalau kenyataan yang sepanjang ini terjalin pada lembaga pemerintah merupakan kalau akuntabilitas serta kinerja yang dihasilkan masih bersifat semu serta cenderung bias apalagi kerap dipertanyakan. Lembaga pemerintah mempunyai kecenderungan buat memberi tahu kinerja yang baik secara kelewatan, sebaliknya program yang kandas cenderung dirahasiakan (Nurkhamid, 2008). Laporan kinerja yang sepanjang ini dibuat oleh lembaga pemerintah cuma hanya dibuat memenuhi kewajiban persyaratan regulasi serta peraturan, tidak secara substantif mencerminkan kinerja yang terjalin di lapangan. Perihal ini setelah itu dapat menyesatkan publik sebagai pengguna data serta pada kesimpulannya berdampak pada ekspektasi publik yang kelewatan terhadap lembaga pemerintah (Ahyaruddin dan Akbar 2018, 2016).

Sehingga akuntabilitas dalam perihal ini merupakan terpaut dengan pengawasan serta pengendalian sikap pemerintah, menghindari pembangunan konsentrasi kekuasaan, serta tingkatkan keahlian belajar serta efektifitas administrasi publik (Iyoha dan Oyerinde 2010). Dalam sistem pemerintahan konstitusional, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, yang merupakan suatu jenis akuntabilitas langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu serta mengaitkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan.
2. Akuntabilitas eksternal, yang merupakan jenis akuntabilitas tidak langsung yang mengaitkan pelaporan kepada pihak luar organisasi (Matek 1977 dalam Akbar 2011).

BAB 4
Proses Sosial dalam Masyarakat

Pengertian Proses Sosial

Proses sosial memiliki sesuatu proses ikatan antara manusia satu dengan manusia yang yang lain. Proses ikatan tersebut berbentuk interaksi sosial yang terjalin dalam kehidupan sehaari- hari secara terus menerus. Interaksi sosial dalam perihal ini dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara orang yang satu dengan yang lain ataupun kelompok yang lain dalam rangka menggapai suatu ataupun tujuan tertentu.

Mengutip beberapa komentar dari para pakar sosiologi terpaut proses sosial, Abu Ahmadi melaporkan cara- cara interaksi (aksi serta respon) yang bisa kita lihat apabila perubahan- perubahan mengacaukan metode hidup yang sudah terdapat. Batas proses sosial sebagai pengaruh timbalbalik antara orang serta kalangan di dalam usaha mereka buat membongkar perkara yang dialami serta didalam usaha mereka buat menggapai tujuannya. Senada dengan Abu Ahmadi, Adham Nasution mengatakan kalau proses sosial merupakan proses kelompok- kelompok serta individu- individu silih berhubungan, yang merupakan bentuk- bentuk yang merupakan wujud interaksi sosial. Ini merupakan bentuk- bentuk yang nampak bila kelompok-kelompok manusia ataupun orang perorangan mengadakan ikatan satu dengan yang yang lain. Berikutnya, menegaskan kalau proses sosial merupakan rangkaian human actions (perilaku/ aksi manusia) yang merupakan aksi serta reaksi ataupun challenge serta respons di dalam hubungannya satu dengan yang lain.

Sedangkan itu, Gilin dan Gilin menarangkan proses sosial merupakan metode berhubungan yang bisa dilihat apabila orang perorangan serta kelompok- kelompok manusia silih berjumpa serta memastikan sistem dan bentuk- bentuk ikatan tersebut ataupun apa yang terjalin apabila terdapat perubahan- perubahan yang menimbulkan goyahnya cara- cara hidup yang sudah terdapat. Tidak hanya itu Soerdjono Dirdjosisworo menarangkan proses sosial sebagai pengaruh timbal balik antara bermacam segi kehidupan bersama. Pengaruh timbal balik berbagai kehidupan bersama. Pengaruh timbal balik sebagai akibat ikatan timbal balik antara individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok menimpa bermacam aspek kehidupan manusia semacam politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan. Bermacam segi kehidupan tersebut merupakan penerapan aspek- aspek utama dalam kehidupan sosial yang memberi warna, apalagi memastikan pertumbuhan dalam kehidupan bersama.

Dari pendapat para pakar bisa disimpulkan kalau proses sosial merupakan cara- cara manusia secara orang ataupun kelompok sosial silih mengadakan ikatan timbal balik menimpa bermacam aspek kehidupan yang berikutnya memastikan sistem dan bentuk- bentuk ikatan tersebut. Dari mari teruji kalau proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan warga. Proses sosial pada dasarnya merupakan siklus pertumbuhan dari struktur sosial yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan masyarat.

BAB 5
Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial dalam Masyarakat

Pengertian Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial dalam Masyarakat

1. Kelompok Sosial

Manusia merupakan makhluk orang yang tidak bisa dibagi. Namun, pula tidak dapat lepas dari manusia lain (Sunarto & Hartono, 2006). Sebab ikatan yang terjalin antara individu- individu (manusia) setelah itu lahirlah sesuatu kelompok- kelompok sosial *(social group)* yang dilandasi oleh kesamaan tujuan ataupun kepentingan bersama.

Koentjaraningrat menerangkan, kelompok merupakan sesuatu warga kecil yang saling berhubungan antar anggotanya yang diatur oleh adat istiadat serta sistem- sistem norma tertentu secara terus menerus dan terdapatnya rasa satu (S. Amiruddin: 111). Pendapat itu didukung oleh Paul B. Horfon yang mengemukakan bila kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang mempunyai pemahaman akan keanggotaanya serta saling berhubungan. Pendapat lain Major Polak mengartikan kelompok sosial selaku beberapa orang yang satu sama lain mempunyai ikatan selaku suatu struktur buat memenuhi kepentingan bersama.

Dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, Bierstedt mendefinisikan kelompok sosial merupakan kelompok yang anggotanya memiliki pemahaman tipe, ikatan satu dengan yang lain. Namun tidak terikat dalam jalinan organisasi. Kelompok ataupun group merupakan kumpulan dari orang yang berhubungan satu dengan yang yang lain. Kelompok sewaktu-waktu bisa dibedakan

secara kolektif, sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan dalam kegiatan universal belum pasti mempunyai interaksi yang sama, begitu pula kebalikannya. Kelompok sosial merupakan kumpulan orang yang mempunyai pemahaman bersama hendak keanggotaan serta silih berhubungan. Kelompok sosial diciptakan oleh anggota warga itu sendiri. Kelompok sosial pula secara tidak langsung bisa pengaruhi sikap para anggotanya. Sebab perihal ini berhubungan dengan karakter tiap anggota. Sehingga, memerlukan karakter yang kokoh saat sebelum bergabung dengan kelompok sosial. Bagi R. M. Macler & Charles H, kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama-sama serta saling ketergantungan dengan kondisi yang sadar serta tolong membantu.

Kelompok sosial tidak cuma buat mendapatkan teman yang mempunyai tujuan yang sama. Namun pula buat penguatan ketahanan sosial. Semacam keterlibatan warga dalam mengelola Desa wisata Pingsang yang dapat kita temukan di Kabupaten Badung (M. Eka dan Aridan Sukma I Nyoman, 2014: 68-69). Dengan dibentuknya sesuatu kelompok buat menjaga sesuatu tepi laut yang terletak di wilayah wisata yang dikagumi para turis lokal ataupun mancanegara. Semacam Kuta, Sanur, serta Nusa Dua. Kehadiran turis berarti bawa rezeki untuk warga serta Provinsi Bali. Kesempatan kerja untuk warga hendak terbuka lebih lebar dari pada provinsi lain. Semacam kesempatan kerja di bidang jasa perhotelan, rumah makan, serta biro ekspedisi ataupun travel. Namun, berlimpahnya rezeki belum pasti bisa diterima secara menyeluruh oleh seluruh daerah/ kota di provinsi pulau itu.

Tidak hanya buat kepentingan bersama, sesuatu kelompok pula bisa dibangun sebab kepentingan orang. Ada pula karakteristik serta ketentuan kelompok sosial. Berikut ini hendak disebutkan sebagian karakteristik kelompok sosial selaku berikut:

a. Terdapatnya dorongan ataupun motif yang sama antar orang satu dengan yang lain.
b. Terdapatnya akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap orang satu dengan yang lain bersumber pada rasa serta kecakapan yang berbeda-beda

c. Terdapatnya penegasan serta pembuatan struktur kelompok yang jelas serta terdiri dari peranan- peranan serta peran masing- masing.
d. Terdapatnya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengendalikan interaksi dalam aktivitas anggota kelompok buat menggapai tujuan yang terdapat.

e. Berlangsungnya suatu kepentingan.
f. Adanya pergerakan yang dinamis.

Ada pula identitas kelompok sosial bagi Cartwright serta Zander sebagai berikut (S. Amiruddin: 113):

a. Adanya interaksi;
b. Adanya pembatasan tertentu;
c. Sadar akan menjadi anggota;
d. Berpartisipasi;
e. Adanya ganjaran untuk anggota yang melanggar norma;
f. Adanya norma sesuai kepentingan;
g. Adanya sifat saling bergantungan; dan
h. Adanya sikap atau prilaku yang hampir sama

Dari ciri- ciri di atas, dibentuknya sesuatu kelompok supaya bisa berikan kemudahan bersama. Sehingga, kala berdialog tentang kelompok maka, kita bakal berdialog tentang banyak orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda- beda yang berkumpul jadi satu atas bawah kepentingan bersama.

2. Organisasi Sosial

Kata organisasi memiliki definisi yang sangat banyak. Nyaris tiap disiplin ilmu pengetahuan berupaya buat mendefinisikan makna organisasi dari sudut pemikiran tiap- tiap disiplin. Terbentuknya kebingunan menimpa definisi ini (defitional confusion), yang menunjukkan kalau perkara organisasi merupakan perkara multi disipliner, lingkungan, memiliki banyak aspek, serta tidak bisa dimonopoli oleh salah satu disiplin saja. Dari sebagian banyak definisi tidak bisa didetetapkan satu definisi itu apakah benar, serta seluruh definisi yang lain salah. Seluruh sudut pandang definisi tentang

organisasi itu hendak benar apabila rumusannya memiliki bawah yang dapat diterima oleh orang yang bersangkutan.

Namun, organisasi kerap didefinisikan selaku sekelompok manusia (*group of people*) yang bekerja sama dalam rangka menggapai tujuan bersama (*common goals*) (B. Irawan, 2019). Yang mana organisasi tersebut berperan selaku fasilitas partisipasi warga dalam pembangunan bangsa serta negeri. Ada pula sebagian definisi organisasi sosial menurut para pakar diantaranya: Dirdjosisworo mendefinisikan organisasi sosial selaku sesuatu wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas serta tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha menggapai tujuan tertentu, yang biasanya berhubungan dengan aspek keamanan anggota organisasi tersebut. Bagi Winardi, organisasi sosial merupakan organisasi- organisasi yang penuhi kebutuhan sosial orang- orang buat menggapai kontak dengan orang lain. Kebutuhan akan identifikasi dorongan timbal balik, misalnya klub- klub guna menggapai tujuan tertentu.

Etzioni Organisasi sosial merupakan unit sosial (ataupun pengelompokan manusia) yang terencana dibangun ataupun dibangun kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka menggapai tujuan- tujuan tertentu. Pernyataan Etzioni didukung oleh Scott yang menyatakan bahwa organisasi soisal merupakan sesuatu kolektivitas yang terencana dibangun buat menggapai sesuatu tujuan yeng didasarkan pada asas kelangsungan.

Semangat berorganisasi serta melakukan nilai budaya lokal bisa menimbulkan rasa kepedulian antar orang. Keinginan serta keahlian buat berorganisasi hendak mempermudah buat membongkar sesuatu permasalahan yang terdapat di dekat. Paling utama organisasi sosial yang bertabiat lokal, yang mana organisasi tersebut bisa lebih gampang tumbuh serta gampang di manfaatkan oleh warga.

Sama halnya dengan kelompok sosial, organisasi sosial pula mempunyai banyak manfaat dalam bermasyarkat. Semacam contoh yang terjalin di Bali pada tahun 2013. Ikatan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan orang orang yang mempunyai

kekuasaan, baik yang mempunyai latar belakang di pemerintahan sampai militer, dikala proses pemilihan kepala wilayah bagaikan suatu ikatan simbiosis (Prameswari, 2015). Untuk individu ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan di dalam pemilihan kepala wilayah ini, pemilihan kepala wilayah berlangsung, organisasi kemasyarakatan (ormas) jadi lahan guna memperoleh dukungan politik. Sebab kala orang ataupun organisasi bisa mempunyai kedekatan yang kokoh dengan suatu organisasi warga, hingga mereka bisa menyusupkan kepentingannya ke dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan iktikad bisa membagikan pengaruh kepada warga sehingga memilah kandidat yang diusung di dalam pemilihan kepala wilayah.

Ciri-ciri terbentuknya organisasi sosial menurut Barelson dan Stainer antara lain (S. Uha Armeini: 110): (a) Kehidupan manusia yang menyeluruh; (b)Dimulai dari masyarakat kecil lalu bertambah banyak; (c) Wadah pergaulan kelompok; (d) Adanya atribut; (e) Alasan sosial dan material; (f) Tujuan organisasi.

Adapun syarat-syarat organisasi antara lain: (a) Mempunyai peraturan; (b) Bekerja sama; (c) Satu tujuan yang sama; (d) Adanya pengurus (ketua, wakil, sekertaris, bendahara dan lainya); dan (e) Terdapat struktur organisasi.

Dengan identitas atas diharapkan sesuatu organisasi sosial bisa berjalan dengan baik. Sehingga mempermudah warga lain buat bergabung dengan organisasi yang sudah dibangun tersebut. Terjadinya kelompok sosial serta organisasi sosial mempunyai latar belakang yang sama. Sebab berkaitan dengan kepentingan manusia yang tetap memusatkan diri buat menggapai tujuan tertentu(goal-oriented). Namun keahlian kerja yang dipunyai tiap manusia terbatas, baik raga, energi pikir, waktu, tempat, pembelajaran serta masih banyak aspek lain yang menghalangi aktivitas manusia (Sunarto & Hartono, 2006). Terdapatnya keterbatasan ini menimbulkan manusia tidak sanggup buat menggapai sebagian besar tujuannya tanpa lewat kerja sama dengan orang lain. Hal- hal tersebut merupakan bawah berarti kenapa manusia senantiasa hidup dalam bermacam berbagai kelompok serta organisasi. Kelompok ataupun organisasi melingkari

seluruh aspek warga secara merata, paling utama aspek ekonomi. Sebab dalam aspek ekonomi ada kelas-kelas dalam masyarakat *(social class)* (Soekanto & Sulistyowati, 2014).

Dengan metode mengumpulkan ataupun mengkoordinasikan beberapa manusia, kelompok sosial serta organisasi sosial sanggup menghasilkan sesuatu perlengkapan sosial yang jitu serta bisa diandalkan. Yang mana sumber daya manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain bersatu. Tujuannya antara lain diharapkan bisa melayani dan penuhi bermacam kebutuhan warga secara efektif dibanding dengan pengelompokan manusia yang lebih kecil serta lebih alamiah, semacam keluarga, kelompok persahabatan serta area warga

BAB 6
Sistem & Struktur Sosial Masyarakat

Sistem Sosial Masyarakat

Dalam sosiologi, sistem sosial merupakan jaringan terpola dari ikatan yang membentuk totalitas yang koheren, yang terdapat antara orang, kelompok, serta institusi. Ini merupakan struktur resmi dari kedudukan serta status yang bisa tercipta dalam kelompok kecil yang normal. Seseorang orang bisa jadi bagian dari banyak sistem sosial secara bertepatan. Contoh sistem sosial meliputi unit keluarga inti, komunitas, kota, negeri, kampus akademi besar, korporasi, serta industri. Organisasi serta definisi kelompok dalam sistem sosial tergantung pada bermacam ciri bersama semacam posisi, status sosial ekonomi, ras, agama, guna sosial, ataupun fitur lain yang berbeda. Sistem sosial pula dapat dipaparkan selaku sesuatu sistem yang terdiri dari sebagian elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tingkah laku sosial yang dicoba orang yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam sistem sosial ada orang ataupun kelompok yang berhubungan serta bersosialisasi sehingga terbentuk ikatan sosial. Totalitas ikatan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok ataupun warga yang kesimpulannya hendak memastikan corak warga tersebut. Namun, bila dipisahkan antara satu sama lain seperti itu yang kita sebut selaku sistem.

Warga selaku sesuatu sistem apabila kita menjajaki penafsiran warga baik secara alami ataupun kultural, hingga hendak nampak kalau keberadaan kedua warga itu merupakan satu kesatuan guna. Terdapatnya mekanisme yang silih tergantung, silih fungsional, silih menunjang antara bermacam faktor serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain seperti itu yang kita sebut selaku sistem, serta senantiasa

hadapi dinamika yang menjajaki hukum karena akibat(kausal). Apabila terdapat pergantian pada salah satu faktor ataupun aspek, hingga faktor yang lain hendak menerima konsekuensi ataupun dampaknya, baik yang positif ataupun yang negatif. Oleh sebab itu, sosiologi memandang warga ataupun pergantian warga senantiasa dalam kerangka sistemik, maksudnya pergantian yang terjalin di salah satu aspek hendak mempengaruhi faktor- faktor lain secara merata serta berjenjang.

Konsep sistem sosial secara simpel dipaparkan selaku interaksi antara peranan- peranan sosial yang membentuk kesatuan dalam sesuatu kelompok sosial yang memiliki nilai sosial serta norma sosial dan cita- cita bersama. Sistem sosial selaku konsep sosiologi, mulai dikemukakan oleh para sosiolog pada abad ke- 19 Meter merupakan Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, serta Emile Durkheim. Tiap- tiap tokoh ini melaksanakan penentuan bagian-bagian utama dari sistem sosial serta kaitannya satu sama lain. Ada pula penafsiran system sosial bagi para pakar semacam bagi Talcott Parsons(1952) menarangkan kalau sistem sosial cuma selaku segmen(ataupun" subsistem") dari apa yang diucap Parsons selaku teori aksi. Parsons mengorganisir sistem sosial dalam perihal unit aksi, di mana satu aksi yang dicoba oleh seseorang orang merupakan satu unit. Dia mendefinisikan sistem sosial selaku jaringan interaksi antar aktor. Bagi Parsons, sistem sosial tergantung pada sistem bahasa, serta budaya wajib terdapat dalam warga supaya penuhi ketentuan selaku sistem sosial. Mirip komentar lebih dahulu Ogbum serta Nimkoff (1956) sudah membagikan tipe simpel dari definisi Parsons merupakan sistem sosial bisa didefinisikan selaku pluralitas orang yang berhubungan satu sama lain cocok dengan norma serta arti budaya bersama.

Abdulsyani (1994) mengatakan sistem sosial merupakan konsep yang sangat universal digunakan dalam menarangkan serta menekuni ikatan manusia di dalam kelompok ataupun dalam organisasi sosial. Dalam perihal ini manusia selaku anggota warga merupakan individu-individu yang saling bergantungan. lnteraksi antar orang tumbuh bersumber pada standar evaluasi serta konvensi bersama merupakan berpedoman pada norma-norma sosial merupakan bawah dari terjadinya sistem sosial. Sebaliknya, Johnson

(1986) mengatakan sistem sosial cumalah salah satu dari sistem-sistem yang tercantum dalam realitas sosial. Sistem sistem sosial tersebut merupakan bentukan dari tindakan-tindakan sosial orang. Berbeda dengan Nasikun (Nasikun, 2008) yang memberikan pengertian sistem sosial tidak lain yakni suatu sistem daripada tindakan- tindakan, yang tercipta dari interaksi sosial yang terjalin di antara bermacam orang, berkembang serta tumbuh tidak secara kebetulan, tetapi berkembang serta tumbuh di atas standar penilaian umum warga. Sistem Sosial merupakan sistem bermasyarakat itu sendiri.

Terdapat beberapa macam klasifikasi sistem sosial yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

1. Klasifikasi oleh Morgan dan Evolusionis lainnya

Morgan serta evolusionis lain sudah menyajikan klasifikasi sistem sosial bersumber pada evolusinya. Bagi mereka, warga ataupun sistem sosial sudah melewati 3 sesi: Sistem Sosial Savagery; Sistem sosial Barbar; Sistem Sosial yang Beradab. Mereka pula sudah mengklasifikasikan sistem sosial bersumber pada perlengkapan penghidupan. Jadi sistem sosial ini merupakan: Sistem Sosial Perburuan, Sistem Sosial Penggembalaan, Sistem Sosial Pertanian, serta Sistem Sosial Industri.

2. Klasifikasi Durkheim

Durkheim menggambarkan 2 tipe sistem social (a) sistem sosial mekanis, serta (b) sistem sosial organic. Warga kuno mempunyai sistem mekanis sebaliknya dalam warga modern, kita menciptakan sistem sosial organik.

BAB 7
Stratifikasi Sosial Masyarakat

Sistem Stratifikasi sosial dalam masyarakat

Dalam warga manapun dapat kita temui bermacam kalangan warga yang pada praktiknya ada perbandingan tingkatan antara kalangan satu dengan kalangan yang lainya. Terdapatnya kalangan yang berlapis- lapis ini menyebabkan terbentuknya stratifikasi sosial. Oleh sebab itu dalam ilmu sosiologi dibahas menimpa lapisan- lapisan warga ataupun yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Sebutan stratifikasi (*stratification*) berasal dari kata strata serta stratum yang berarti susunan. Sebab itu stratifikasi sosial (*social stratification*) kerap diterjemahkan dengan pelapisan warga.

Beberapa orang yang memiliki peran (status) yang sama bagi dimensi masyarakatnya, dikatakan terletak dalam sesuatu susunan (*stratum*). Stratifikasi sosial merupakan sistem pembedaan orang ataupun kelompok dalam warga, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda- beda secara hierarki serta membagikan hak dan kewajiban yang berbeda- beda pula antara orang pada sesuatu susunan dengan susunan yang lain. Pitirin A. Sorokin melaporkan kalau social stratification merupakan pembedaan penduduk kedalam kelas- kelas secara bertingkat (secara hierarkhis).

Perwujudanya merupakan terdapatnya kelas-kelas besar serta kelas- kelas yang lebih rendah. Bagi Sorokin, bawah serta inti dari lapisan- lapisan dalam warga merupakan tidak terdapatnya penyeimbang dalam pembagian hak-hak serta kewajiban-kewajiban, serta tanggung jawab nilai-nilai sosial serta pengarahanya diantara anggota warga. Diantara warga yang terdapat, mereka sebagain terdapat yang memiliki stratifikasi sosial yang sangat ketat. Seseorang lahir dalam kalangan tertentu serta dia tidak hendak bisa jadi bertambah ke kalangan yang lebih besar. Keanggotaanya dalam suatu kategori ialah aspek utama yang menentukan besar pendidikan yang

bisa ditempuhnya, jabatan yang didudukinya, orang yang dinikahinya serta lain sebagainya (Pattinasarany, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial ialah pembedaan posisi seorang maupun kelompok yang pembedaaan kedudukannya secara vertikal. Tidak hanya itu, Pitirim A. Sorokin meningkatkan bahwa stratifikasi sosial ialah pembedaan penduduk ke dalam suatu kelas- kelas yang berbentuk tingkatan ataupun hierarki. perwujudan dari stratifikasi sosial bagi Sorokin ini ialah terdapatnya lapisan- lapisan dalam warga yang disebut sebagai strata. Lebih lanjut Sorokin menarangkan kalau dalam tiap susunan terdiri dari orang yang mempunyai tingkatan sosial yang relatif. Sejalan dengan Soerjono serta Sorokin, P. J. Bouman menerangkan bahwa stratifikasi sosial ialah terdapatnya kalangan manusia yang cara hidupnya menyadari tentang hak istimewa (Ahmad).

Terdapatnya hak istimewa ini membuat kalangan manusia itu menuntut terdapatnya gengsi dalam kemasyarakatan.

Terdapat 3 prinsip tentang stratifikasi sosial ialah:

a) Atribut kemanusiaan yang utama merupakan akal pikiran yang buatnya memandang kehidupan ini selaku sesuatu rahasia yang mesti dicarikan jawabannya.
b) Atribut ke binatangan yang melekat pada manusia berbentuk nafsu menuntutnya buat menenuhi seluruh wujud kebutuhan baik yang bertabiat raga ataupun non raga serta menjadikan manusia tidak merasa puas atas apa yang sudah diperolehnya.
c) Ketidakluasan manusia atas apa yang dicapainya dalam 2 bidang tersebut menimbulkan terbentuknya perlombaan antara yang satu dengan yang lainnya buat saling mendahului serta menguasai.

Sistem startifikasi sosial berpokok pada pertentangan dalam warga. Dengan demikian sistem stratifikasi sosial cuma memiliki makna spesial untuk masyarakat- masyarakat tertentu yang jadi obyek penyelidikan. Dalam sistem stratifikasi sosial bisa dianalisa dalam ruang lingkup unsur- unsur selaku berikut: Pertama, distribusi hak- hak istimewa yang obyektif semacam misalnya kekayaan. Kedua, sistem yang diciptakan oleh warga ialah suatu wibawa(prestige) serta penghargaan. Ketiga, kriteria sistem pertentangan baik yang terjalin

pada orang ataupun kelompok. Keempat, lambang- lambang kehidupan semacam tingkah laku hidup, serta cara berpakaian. Kelima, solidaritas diantara orang ataupun kelompok yang terjalin dari interaksi, kesadaran hendak peran masing- masing individu ataupun kelompok serta aktifitas.

Bentuk- bentuk startifikasi sosial: sesuatu pelapisan sosial itu terjalin bersumber pada sesuatu kriteria tertentu, serta dengan bersumber pada kriteria- kriteria tersebut, hingga dapatlah bentuk-bentuk strata sosial antara lain selaku berikut:

1) Kriteria biologis. Pada kriteria ini dipecah atas kriteria bagi tipe kelaminya ialah pria serta wanita, serta kriteria bagi usianya ialah kalangan anak- anak, berusia serta kalangan tua.

2) Kriteria geografis. Pada kriteria ini bisa digolongkan atas: warga desa serta warga kota. Warga kota dibagi atas warga kota kecil, kota madya serta kota besar.

Stratifikasi sosial dalam warga bisa dilihat dalam struktur sosial, sebagaimana yang dikemukakan Darmansyah selaku berikut: Pertama, strata itu tercipta bersumber pada latar belakang kemajuan kebudayaan yang diaktualisasikan dalam wujud mutu orang serta kelompok. Kedua, sesudah strata tercipta setelah itu lahirlah kelompok- kelompok yang dipandang inferior serta superior. Ketiga, terdapatnya kekuasaan serta wewenang yang dipunyai oleh kalangan superior (Binti Maunah).

Terdapat banyak dimensi yang dapat digunakan buat mendeskripsikan stratifikasi sosial yang terdapat dalam sesuatu kelompok sosial ataupun komunitas (Svalastoga & Alimandan, 1989) misalnya: ukuran pemilikan kekayaan (Koentjaraningrat, 1990) sehingga terdapat strata wong sugih serta wong cilik. Awal mulanya, dimensi ini digunakan buat melaksanakan identifikasi pada warga Jawa, hingga yang disebut pemilikan kekayaan hendak terfokus pada simbol- simbol ekonomi yang umum dihargai warga Jawa. Misalnya, pemilikan tanah(rumah, pekarangan ataupun sawah). Dimensi distribusi sumber daya diteorikan oleh Gerhard Lensky, di mana terdapat strata tuan tanah, strata petani bebas, strata pedagang, strata pegawai, strata petani, strata pengrajin, strata pengangguran, serta strata pengemis. Ukuran ini pada awal mulanya diberlakukan pada

warga pra- industri dimana sistem stratifikasi sosialnya belum sekompleks warga industri.

Terdapat 7 dimensi stratifikasi sosial(diteorikan Bernard Baber), ialah: occupational prestige, authority and power ranking, income or wealth, educational and knowledge, religious and ritual purity, kinship, ethnis group, and local community. Ketujuh ukuran ini, baik secara terpisah ataupun bersama- sama, hendak dapat membantu dalam mendeskripsikan bagaimana susunan stratifikasi sosial suatu kelompok sosial(komunitas) serta faktor yang menjadi dasar terjadinya stratifikasi sosial tersebut.

Samuel Huntington mengemukakan kalau terdapat dimensi modernisasi guna memaparkan stratifikasi sosial, ialah: strata sosial(baru) yang bisa merealisasi aspirasinya(the new have) serta strata sosial yang tidak sanggup merealisasi aspirasinya ataupun mereka kalah dalam memperebutkan posisi strata dalam komunitasnya(the looser). Dimensi ini lebih terfokus pada stratifikasi sosial yang pembentukannya didasarkan pada bermacam simbol gaya hidup. Teorisasi Huntington ini dalam sebagian perihal berhimpitan dengan teori Leisure Class- nya dari Thorstein Veblen (Beteille, 1977).

Individu selaku makhluk sosial pasti tidak dapat dihindarkan dari yang namanya interaksi sosial di masyarakat. Terdapatnya interaksi sosial ini hendak pengaruhi pembentukan suatu kelompok. Secara universal pengelompokan warga Indonesia dibagi jadi 2 bentuk. Pertama, pengelompokan secara horizontal berbentuk deferensiasi serta Kedua, pengelompokan secara vertikal berbentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan sistem pembedaan orang ataupun kelompok dalam warga, yang menempatkannya pada kelas- kelas sosial yang berbeda- beda secara hierarki serta membagikan hak dan kewajiban yang berbeda- beda pula antara orang pada sesuatu lapisan dengan lapisan yang lain.

Sistem stratifikasi sosial merupakan perbandingan penduduk ataupun warga ke dalam kelas- kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas atas, kelas tengah, serta kelas rendah. Dasar serta inti sistem stratifikasi masyarakat merupakan terdapatnya ketidakseimbangan pembagian hak serta kewajiban, dan tanggung jawab tiap- tiap orang ataupun kelompok dalam sesuatu sistem sosial.

Penggolongan dalam kelas- kelas tersebut bersumber pada dalam sesuatu sistem sosial tertentu ke dalam sesuatu lapisan- lapisan yang lebih hierarkis bagi dimensi kekuasaan, previllege serta prestise. Stratifikasi sosial terjalin sebab terdapatnya pembagian (segmentasi) kelas- kelas sosial di warga.

Kelas sosial merupakan sesuatu susunan(strata) dari orang-orang yang mempunyai berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial. Kelas sosial ialah sesuatu kenyataan sosial yang berarti, bukan cuma hanya sesuatu konsep teoritis saja, namun pula mengelompokkan mereka atas: Awal, kekayaan serta pemasukan. Kalau kekayaan serta pemasukan ialah determinan kelas sosial yang penting diakibatkan oleh kedudukannya dalam membagikan gambaran tentang latar belakang keluarga serta cara hidup seseorang. Kedua, pekerjaan. Pekerjaan ialah salah satu penanda terbaik guna mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan ialah penanda terbaik buat mengenali kelas sosial seorang. Ketiga, pendidikan. Kelas sosial serta pendidikan sama- sama mempengaruhi sekurang- kurangnya dalam 2 perihal diantaranya: (a) Pendidikan yang tinggi membutuhkan uang serta motivasi; (b) Jenis serta tinggi- rendahnya pendidikan pengaruhi jenjang dalam kelas sosial.

Pendidikan dikira lebih berarti sebab tidak cuma melahirkan kemampuan kerja melainkan pula melahirkan pergantian mental, selera, minat, tujuan, cara berdialog serta perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang. Tidak hanya diketahui terdapatnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat, ada pula unsur-unsur yang membentuk lapisan- lapisan masyarakat. Kedua faktor tersebut merupakan status serta peranan (Binti Maunah).

BAB 8
Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan

Pengertian Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

Secara harfiah pengertian masyarakat desa tidak jauh berbeda dengan masyarakat kota yang berarti kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air atau tanah kelahiran. Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Secara umum, desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat. Desa juga dapat dikatakan sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Desa sendiri terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memerhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat yang akhirnya terbentuklah desa. Adapun pengertian desa menurut para ahli diantaranya Rifhi Siddiq yang menyatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Dengan kata lain, masyarakat desa cenderung bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Selanjutnya Sutardjo Kartodikusumo mengungkapkan desa merupakan satu kesatuan hukum yang bertempat tinggal di dalam suatu masyarakat dan

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pendapat tersebut didukung oleh R. Bintarto yang mengatakan desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Desa juga mencakup semua segmen dari politik, ekonomi, dan budaya.

Hal ini berbeda dengan keadaan masyarakat kota yang kebanyakan berasal dari luar daerah yang menetap disuatu tempat untuk menjadi tempat singgah dan akhirnya menjadi tempat bermukim. Banyak ahli memberikan pendapat tentang masyarakat kota, seperti Pandeleke yang menyatakan bahwa masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang cenderung memiliki sifat individual dan heterogen dengan kehidupan yang modern yang dilengkapi dengan berbagai arsitektur dan industri yang canggih. Dalam masyarakat kota terdapat banyak kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan profesi (Pandaleke, 2015:5).

Masyarakat perkotaan memiliki tingkat keberagaman sosial yang tinggi dengan tingkat asoasi yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak. Kontrol sosial di dalam masyarakat perkotaan menggunakan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga toleransi sosial sangat tinggi. Masyarakat perkotaan lebih mengutamakan prestasi sehingga mobilitas sosial relatif tinggi. Asosiasi di dalam masyarakat perkotaan bersifat sukarela dan cenderung menganut individualisme karena adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan secara individu. Selain itu, masyarakat perkotaan cenderung memisahkan diri secara fisik berdasarkan perbedaan kelompok sosial.

Kota merupakan Kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, pemukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Pembentukan kota merupakan hasil dari perkembangan desa dalam perluasan pemukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Kota berfungsi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri dan kebudayaan. Pemilihan kota sebagai

tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa, transportasi dan manufaktur. Kota juga memiliki kekurangan yaitu biaya hidup yang tinggi dan tingkat kriminalitas yang tinggi (Jamaludin, 2015).

BAB 9
Masyarakat Minoritas dan Kemiskinan

Pengertian Masyarakat Minoritas

Istilah masyarakat dalam bahasa indonesia merupakan terjermahkan dari bahasa inggris *society* atau *community.* Konsep masyarakat yang berasal dari *society* berbeda dengan konsep masyarakat yang berasal *community*, karena dar preseptif sosiologi pengertian *society* berbeda dari community (Arsyad & Lincolin, 1988). Dalam topik ini, istilah masyarakat diterjermahkan dari kata atau konsep *community*. Oleh karena itu, agar istilah atau konsep masyarakat tidak rancu atau bermakna ganda, maka dalam materi ini istilah atau konsep *community* diterjemahkan sebagai komunitas.

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif (Kristianus Atok, 2004: 2). Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Masyarakat menurut Max Weber merupakan suatu struktur atau aksi yang pada pokokmya ditentukan oleh harapan dan nilai nilai yang dominan warga nya asli sosiologi dan bapak sosiologi modern (Max Waber, 1974). Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu: kawanan (*band*), suku (*tribe*), kedatuan (*chiefdom*), dan negara (*state*). Jenis masyarakat paling kecil atau kawanan biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok, banyak diantaranya merupakan kumpulan dari satu atau beberapa keluarga besar. Apabila masyarakat diartikan sebagai komunitas, maka Wikinson mendifinisikan masyarakat

sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang bias. Menurut Thomas Hobbes, masyarakat (komunitas) merupakan proses alamiah di mana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Hobbes mengemukakan bahwa kepentingan diri pribadi dapat didapati dalam kelompok (Maryani & Nainggolan, 2019).

Dalam bermasyarakat sering terlihat terdapat beberpa kelompok orang yang secara tidak langsung menguasai dan memiliki legitimiasi dari rekanannya untuk menjadi mayoritas, ada pula yang menyendiri dan mencoba untuk membuat budaya baru yang diakibatkan ketidak sesuaian budaya yang sudah ada dengan keyakinannya sendiri. Menurut Ali Kettani medefinisikan hal tersebut merupakan sikap minoritas, dengan kata lain minoritas dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang karena satu dan lain hal menjadi korban pertama despotisme negara atau komunitas yang membentuk mayoritas (Kettani, 2005). Mereka diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat dimana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam kamus Bahasa indonesia minoritas dapat diartikan golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih jika dibandingkan dengan golongan lain disuatu masyrakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan itu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI: 657). Versi lain dalam *kamus English Indonesia Dictionary*. Bahwa istilah inoritas berasal dari kata *minority* yang berarti golongan kecil (Echols & Shadily, 1982) ataupun laporan dari golongan kecil. Daripada pengertian diatas, dapat dipahami bahwa minoritas merupakan kelompok, penduduk dan masyarakat atau golonngan sosial yang lebih kecil atau lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah golongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar atau lebih banyak.

Kumpul banyak individu dan sedikit individu merupakan sosiologi sebuah komunitas. Karena itu, sejatinya bila siapapun yang terhimpun dalam suatu kelompok manapun tetapa memiliki hak, kewajiban, kesempatan dan akses yang sma dalam segala hal, dan

persoalan. Dari adanya persamaan hak dan kewajiban diatas, maka batasan mayoritas dan minoritas diatas nadi lebih jelas. Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut soal jumlah atau kuantitas yang berkaitan dengan dan hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal. Satu kelompok sebagai minoritas, apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil (sedikit) daripada kelompok lain dalam komunitas (2013: 11).

Minoritas etnik atau ras berdasarkan kelompok agama memag selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragam tertentu, yang secara kuantitatf (nominal/matematis) maupun kualitatf (peran dan status sosial) berbeda dengan agama kelompok ras dominan atau mayoritas (Liliweri, 1991).

Dari sudut pandang ilmu sosial, pengertian minoritas tidak sealu terkait dengan jumlah anggota kelompoknya suatu kelompok akan dapat dianggap sebagai kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, perlindungan dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupan nya sendiri bila dibandingkan dengan anggota anggota kelompok dominan atau mayoritas. Dengan demikian, bisa saja suatu kelompok secara kuantitas atau jumlah dari anggotanya merupakan mayoritas (dominan) akan tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas kareana kareana kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil dan lebih lemah dari pada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit (minoritas) (Amroeni: 37).

Berikut ini ciri-ciri kelompok minoritas:

a) Mereka yang ditekan atau yang dihalangi oleh kelompok mayoritas sebagai hasil dari perkembangan kekuasaan yang berbeda, minoritas merupakan kelompok yang selalu tidak beruntung daripadaa kelompok mayoritas.
b) Mereka dibedakan secara fisik atau budaya dari kelompok mayoritas yang dominan, mereka dibiarkan hidup ditempat tertentu kareana kurang daya tariknya.
c) Kelompok sosial yang disebut minoritas merupakan pengelompokan sejumlah orang yang merasa atau mempunyai pengalaman tentang ketidakmampuan dalam beragama aspek. Karena ketidakmampuan itu, mereka prasangka, didiskriminasi, disegresasi atau mengalami kombinasi dari faktor-faktor

tersebut dan kemudian dierlakukan secra tidak sederajat oleh kelompok lain.

d) Kelompok minoritas terbentuk oleh suatu pengalaman tentang karakteristik khusus yang dipertukarkan khusus oleh para anggotnya, misalnya karakteristik fisik atau budaya atau keduanya, sehingga oleh kelompok dominan mereka dianggap mempunyai harga diri yang rendah (Liliweri, 1991). Oleh karena itu, batasan minoritas tidak selamanya terkait erat dengan persoalan jumlah anggotanya, melainkan terkait juga dengan kekuasaan, kontrol dan pengaruh dalam komunitas. Sedangkan kelompok atau masyarakat mayoritas dimaknai sebagai sekumpulan besar manusia dengan karakteristik (kepentingan) relativsama yang mendiami suatu wilayah atau daerah. Faktanya, masyarakat yang mendiami suatu wilayah ataupun beragam kepentingan inilah yang menyebabkan konflik dan pertentangan. Jadi, kelompok minoritas merupakan kelompok individu yang tidak dominan dengan cri khas bangsa, suku, agama, dan bahsa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk.

Pengertian minoritas dan mayoritas dalam penelitian ini dimkasudkan merupakan suatu kelompok umat islam mayoritasdan umat kristen minoritas. Batasan mayoritas dan minoritas yang lazim untuk digunakan dalam suatu negara, wilayah, daerah, kecamatan dan desa. Kelompok minoritas merupakan kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku, agama bahasa tertentu yang berbeda dari mayoriyas penduduk didesa bandar setia. Dalam UU negara Islam yang pertama (yang berdiri di Madinah pasca hijrah Rasulullah SAW. dari Mekah pada tahun 1H/622M), Kita dapati pasal-pasal mencapai lima puluh dua butir. Kita temukan pasal yang berbicara tentang kaum Yahudi berjumlah empat belas. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan tentang penggabungan kaum Yahudi ke dalam keseluruhan rakyat negara baru ini. Mereka dianggap sebagai satu umat bersama kaum mukmin dari kalangan Muhajirin dan Anshar (Khadar et al., 2005).

Pasal-pasal ini mengatur persamaan hak dan kewajiban antara mereka dan kaum mukmin, serta mengatur hak utuh mereka dalam

menjalankan keyakinan agama yang berbeda dengan kaum muslim. Dengan demikian, dalam UUD ini Kita bisa membaca satu bentuk dari mereka yang tergolong minoritas mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan, dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya (Amroeni: 46). Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu merupakan berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing; (3) adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada merupakan merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajadnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut. Dalam pembahasan tersebut di atas, keberadaan dan kehidupan minoritas yang dilihat dalam pertentangannya dengan dominan, merupakan sebuah pendekatan untuk melihat minoritas dengan segala keterbatasannya dan dengan diskriminasi dan perlakukan yang tidak adil dari mereka yang tergolong dominan (Amroeni: 46).

Dalam perspektif ini, dominan-minoritas dilihat sebagai hubungan kekuatan. Kekuatan yang terwujud dalam struktur-struktur hubungan kekuatan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat-tingkat lokal. Bila kita melihat minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dengan mayoritas maka yang akan dihasilkan merupakan hubungan mereka yang populasinya besar (mayoritas) dan yang populasinya kecil (minoritas). Perspektif ini tidak akan dapat memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya.

Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuakn yang berbeda dan

merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan sosial askriptif merupakan suku bangsa (termasuk golongan ras, kebudayaan sukubangsa, dan keyakinan beragama), gender atau golongan jenis kelamin, dan umur. Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk merubah cara hidup dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas (atau asimilasi) merupakan pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk. Cara yang terbaik merupakan dengan merubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural *(multicultural society*), dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan.

BAB 10
Studi Konflik dalam Individu, Masyarakat, dan Institusi

Pengertian Studi Konflik Individu, Masyarakat, dan Institusi

A. Pengertian Studi Konflik

Manusia menurut seorang filsuf terkemuka bernama Aristoteles, disebut sebagai Zoon Politicon yang berarti manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini melahirkan konsekwensi logis dimana manusia selalu berupaya untuk berorganisasi, dan bersosialisasi, serta berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada dalam lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam konteks sebagai makhluk sosial. Hal yang krusial kemudian merupakan seluruh komponen yang ada dalam organisasi, terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik beragam Manusia memiliki keberagaman yang terdiri atas perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran, politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi setiap saat. Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu ada didunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan dan bahkan dalam sistem sosial terkecil bernama keluarga selalu saja terdapat pertentangan. Konflik terjadi pada masa lalu, sekarang, dan pasti akan terjadi pada masa yang akan datang.

Konflik juga terjadi karena masalah ekonomi atau penghidupan oleh masyarakat. Konflik terjadi antara petani dan perusahaan perkebunan atau departemen kehutanan dan lembaga

pemerintah. Konflik juga terjadi antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Konflik juga terjadi antara para mahasiswa dan pemerintah, misalnya mengenai kenaikan harga bahan bakar dan biaya pendidikan. Mahasiswa yang menyatakan diri sebagai bagian dari rakyat mengangap kenaikan harga bahan bakar akan membuat rakyat semakin miskin. Demikian juga, mahasiswa berpendapat bahwa biaya pendidikan yang terus meningkat membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan, konflik bisa terjadi antara kelompok mahasiswa yang satu dengan kelompok mahasiswa yang lainnya, baik di universitas yang sama maupun di universitas yang berbeda. Calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang ini tidak sungkan untuk melakukan bentrokan fisik karena masalah sepele. Bentrokan ini sering kali menimbulkan luka-luka yang tidak perlu dan bahkan menimbulkan kematian.

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configure* yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi kedalam bahasa inggris, conflict yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, konflik. Para pakar telah mengemukakan berbagai defenisi mengenai konflik. Defenisi yang dikemukakan para pakar tersebut tampak beda walaupun intinya sama, karena mereka mendefinisikan konflik dari perspektif yang berbeda. Ada yang mendefenisikan dari perspektif psikologi, sains perilaku, sosiologi, komunikasi, antropologi, dan ilmu sosial.

Konflik itu dapat bersifat fungsional atau disfungsioanal, karena konflik itu memiliki potensi untuk memperbaiki atau merusak kemajuan organisasi, semuanya tergantung dari cara bagaimna organisasi tersebut mengelola konflik. Ada suatu tingkat konflik sangat fungsional yang optimal dengan tingkat prestasi maksimum. Apabila tingkat konflik itu terlalu rendah , perubahan organisasi menjadi terlalu pelan untuk memenuhi tuntutan baru yang dihadapinya, dan kelangsungan hidupnya terancam. Apabila tingkat konflik terlalu tinggi, kekacauan dan gangguan juga membahayakan kesempatan organisasi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada suatu tingkat konflik sangat fungsional yang optimal dengan tingkat prestasi maksimum. Apabila tingkat konflik itu terlalu rendah, perubahan organisasi menjadi terlalu pelan untuk memenuhi

tuntutan baru yang dihadapinya, dan kelangsungan hidup perusahaan terancam. Apabila tingkat konflik terlalu tinggi, kekacauan dan gangguan juga membahayakan kesempatan organisasi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.

Konflik pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial. Walaupun teori konflik klasik pada dasarnya sudah tidak dapat digunakan untuk menganalisis fenomena konflik kontemporer, karena teori ini diciptakan pada konteks kesejarahan yang berbeda dan perubahan struktur dan dinamika masyarakat telah diluar imajinasi para ilmuwan teori konflik klasik. Namun antara teori klasik dan teori kontemporer pada dasarnya sepakat bahwa konflik memainkan peran sentral dalam kehidupan karena mampu menjadi agen perubahan dan menjadi motor yang memobilisasi tindakan sosial. Konflik terjadi antar kelompok memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan menuju ke arah kesepakatan (*consensus*).

Selain itu masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan dari paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi, konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang terelakkan dalam masyarakat. Konflik dapat memberika sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula meklahirkan konflik. Pierre van den Berghe mengemukakan empat fungsi konflik yaitu :

a) Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
b) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
c) Mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

d) Fungsi komunikasi.

Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan leih tepat (Ritzer, 2012). Definisi konflik menurut para pakar ahli defenisi konflik (Hocker & Wilmot, 1985) Substansi yang paling mendasar dalam tulisan ini merupakan hendak mencoba untuk mendefinisikan konflik dari perspektif yang sesederhana mungkin yakni konflik interpesonal atau konflik yang sering terjadi antara satu dengan yang lainnya. Pembahasan tentang konflik interpersonal menjadi penting sebab geneologi utama dari konflik merupakan adanya ketidak cocokan dan ketidak sepahaman dari dua pihak yang berbeda dalam satu komunitas yang sama. Sehingga membahas dan mengkaji tentang konflik interpersonal sesungguhnya merupakan ikhtiar yang dilakukan untuk manapaktilasi rekam jejak dari awal mula perjalanan konflik dalam arti yang sesungguhnya. Berangkat dari kesadaran di atas, defenisi konflik dapat dipahami secara sederhana sebagai proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, mengunakan pola perilaku atau interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Dari defenisi tersebut ada sejumlah indikator yang memerlukan penjelasan:

a) Proses, konflik terjadi melalui suatu proses yang unik artinya suatu konflik berbeda dengan konflik lainnya. Pada tabel dibawah ini, dilukiskan model linier proses konflik yang terdiri dari masukan, proses, dan keluaran.
b) Dua pihak atau lebih. Kecuali konflik personal, konflik terjadi antara dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat bisa: (1) antara satu orang individu dengan individu yang lainnya, (2) antara seorang individu dan satu kelompok individu, (3) antara satu kelompok individu dengan kelompok individu lainnya, dan atau (4) antara satu organisasi dan organisasi lainnya.
c) Saling tergantung. Pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependent satu sama lain. Artinya, pihak-pihak

tersebut tidak bebas untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan atau bantuan, izin, dan merugikan dan atau mengurangi kebebasan pihak lainnya. Setiap tindakan atau tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik akan berpengaruh pada pihak lainnya.

d) Pertentangan mengenai objek konflik. Objek konflik merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik mempunyai perbedaan pendapat, yaitu sikap dan kepercayaan dalam menyikapi objek konflik.
e) Diekspresikan. Pertentangan akan menjadi konflik jika diekspresikan. Jika pertentangan tidak atau belum diekspresikan, maka konflik bersifat laten atau tidak kelihatan. Mungkin perbedaan pendapat mengenai objek konflik sudah terjadi. Tetapi kedua belah pihak diam saja dan belum terjadi interaksi mengenai perbedaan tentang objek konflik. Konflik baru terjadi ketika perbedaan tersebut diinteraksikan. Ekspresi mengenai objek konflik merupakan kejadian pemicu terjadinya konflik. Pengekspresian dapat mengunakan bahasa verbal, bahasa badan, atau bahasa tertulis.
f) Pola perilaku. Saat konflik terjadi, pihak yang terlibat mengunakan pola perilaku tertentu. Pola perilaku merupakan kecenderungan orang untuk berperilaku secara tertentu dalam menghadapi situasi konflik. Pola perilaku ini disebut juga sebagai gaya manajemen konflik dan taktik konflik. Gaya manajemen konflik dipengaruhi sejumlah faktor yang akan dibahas lebih terperinci pada pembahasan Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi selanjutnya.
g) Interaksi konflik. Proses konflik menimbulkan interaksi konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Interaksi bisa berupa saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, mencari teman, menyelamatkan muka *(face saving)*, saling melakukan agresi, melakukan negosiasi, atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik.
h) Keluaran konflik. Interaksi konflik diantara pihak-pihak yang teribat dalam konflik menghasilkan keluaran konflik yang unik, untuk masing-masing jenis konflik. Keluaran konflik bisa berupa ditemukannya solusi atas suatu konflik, seperti *win & win*

solution, win & lose solution, serta *lose & lose solution.* Keluaran konflik juga bisa menciptakan suatu perubahan sistem sosial (Asiah, 2018).

BAB 11
Pranata Sosial dalam Masyarakat

Pengertian Pranata Sosial dalam Masyarakat

A. Pengertian Pranata Sosial

Secara umum yang dimaksud dengan pranata sosial atau lembaga sosial dapat dimaknai sebagai organisasi, asosiasi atau kelompok sosial (Sudarma, 2008). Pranata sosial merupakan sekumpulan norma (sistem norma) dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Proses sejumlah norma menjadi pranata sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Oleh karena itu, pranata sosial sering disebut lembaga-lembaga sosial.

Pranata sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa asing *social institutions*, itulah sebabnya ada beberapa ahli sosiologi yang mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan, di antaranya merupakan Soerjono Soekanto. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai himpunan norma dari berbagai tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat Pada umumnya setiap manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sebagai Mahluk sosial, seiring dengan pertumbuhan dan pola relasi manusia dalam bermasyarakat maka dari itu manusia tidak terlepas dari pranata, terbentuknya pranata (lembaga yang mengatur) bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama.

Beberapa pengertian pranata sosial menurut pendapat para ahli sosiologi diantaranya: Bruce J. Cohen yang mengartikan pranata atau lembaga sosial sebagai sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Dari sisi lain Joseph S, Rucek dan Roland L. Waren, berpendapat pranata sosial merupakan pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dan cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur pernyataan itu didukung oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt yang menyatakan pranata sosial merupakan suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan oleh masyarakat dianggap penting.

Menurut (Soekanto & Sulistyowati, 2014) Pranata tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Menurut (Koentjaraningrat, 1990) mengemukakan bahwa pranata merupakan sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan:

1. Kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya.
2. Kebutuhan akan mata pencaharian menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti misalnya pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain.
3. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya.
4. Kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan menimbulkan kesusastraan, seni rupa, seni suara, dan lain-lainya.
5. Kebutuhan jasmaniah manusia menimbulkan olahraga, pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lainya

BAB 12
Penyimpangan dan Pengendalian Sosial dalam Masyarakat

Pengertian Penyimpangan dan Pengendalian Sosial

Penyimpangan merupakan pelanggaran norma sosial, dalam hal ini norma merupakan standar bagaimana seharusnya warga negara dalam situasi tertentu. Pelanggaran norma biasanya diberi sanksi oleh khalayak sosial. Sanksi ini merupakan tekanan dari sebagian besar anggota masyarakat yang percaya bahwa mereka memenuhi norma-norma tersebut. Norma pertama memiliki dua konsep umum, sebagai evaluasi atau evaluasi perilaku, yaitu evaluasi perilaku yang dianggap baik atau tidak seharusnya terjadi. Kedua, sebagai perilaku yang diharapkan, mengacu pada aturan perilaku yang didasarkan pada kebiasaan atau kebiasaan masyarakat tertentu (Suyanto & Narwoko, 2004).

Johnson (1986) dalam M.Z Lawang (Setiadi & Kolip, 2015) Membatasi perilaku menyimpang mencakup semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menyebabkan penguasa dalam sistem tersebut berusaha memperbaiki perilakunya. J. Cohen (Setiadi & Kolip, 2015) membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. B. Herton (Setiadi & Kolip, 2015), perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Dari berbagai batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya merupakan semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok tidak sesuai dengan nilai- nilai dan norma-norma

yang berlaku di dalam suatu kelompok tersebut. Paul Horton (Setiadi & Kolip, 2015) mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya :

Penyimpangan harus dapat didefenisikan, Penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian). Penyimpangan sosial bisa juga di kategorikan sebagai patologi sosial yang berarti penyakit masyarakat/sosial atau merupakan segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, diantaranya yaitu: perjudian, korupsi, kriminologi, pelacuran, penyalahan narkotika dan obat-obat terlarang, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa, homoseks dan alkoholisme. Adapun sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang menurut Setiadi (Setiadi & Kolip, 2015) yaitu: sikap mental yang tidak sehat, ketidakharmonisan dalam keluarga, pelampiasan rasa kecewa, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, ketidaksanggupan menyerap norma, proses sosialisasi nilai-nilai subkultur menyimpang, kegagalan dalam proses sosialisasi, dan adanya ikatan sosial yang berlainan (R. Rahmawati et al., 2016).

Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang menyimpang dari norma norma dan nilai nilai sosial yang ada di dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok. penyimpangan sosial dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok. bentuk penyimpangan sosial dapat berupa kejahatan, perkelahian, Pergaulan bebas, mengonsumsi obat obat terlarang, gaya hidup yang tak wajar, dan semacamnya.

Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Perilaku yang menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi karena seorang individu atau kelompok tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Hal

tersebut menyebabkan individu atau kelompok terjerumus ke dalam pola perilaku yang menyimpang. Dengan kata lain, terjadilah penyimpangan sosial dalam kehidupan.

Menurut (Soetomo, 2008) menyatakan perilaku menyimpang tersebut dianggap sebagai sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Ada dua jenis perilaku menyimpang yang teridentifikasi, yaitu perilaku menyimpang murni dan perilaku menyimpang implisit. Perilaku menyimpang murni merupakan perilaku yang tidak mengikuti aturan dan dianggap memalukan oleh masyarakat, meskipun orang tersebut tidak melakukannya. Penyimpangan merupakan setiap perilaku yang diklaim melanggar norma kelompok atau masyarakat. Perilaku menyimpang (deviasi sosial) merupakan semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku menyimpang dapat terjadi dimana saja, baik keluarga maupun masyarakat. Dari definisi diatas, pengertian perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Perilaku-perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat sehingga sering dikaitkan dengan istilah-istilah negative(Herabudin, 2015).

Dalam kajian perilaku menyimpang, terdapat perbedaan pendapat mengenai identifikasi pelaku dan jenis perilaku atau kondisi yang dianggap menyimpang. Kebanyakan orang hanya dapat mengidentifikasi perbedaan ketika mereka melihatnya. Misalnya, bunuh diri, keterbelakangan mental, homoseksualitas, alkoholisme, secara umum diterima sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum. Jadi, dalam hal menentukan deviasi, posisi dan peran orang sama pentingnya dengan orang yang melakukan penyimpangan. Walaupun terdapat beberapa persamaan dan jenis pengendalian sosial diantara kelompok masyarakat, tetapi reaksi masyrakat terhadap masing-masing orang yang dianggap menyimpang akan memberikan konsikuensi yang berbeda-beda. Mulai dari hanya sekedar gunjingan sampai dengan hukuman mati (Siahaan, 2009). Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut

pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial.

Didalam pola hubungan-hubungan yang lazim disebut interaksi sosial, anak atau remaja merupakan salah satu pihak, disamping adanya pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut saling mempengaruhi, sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya. Proses saling memengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lain yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur yang lebih berpengaruh biasanya tergantung dari mentalitas pihak yang menerima. Artinya, sampai sejauh manakah pihak penerima mampu menyaring unsur-unsur luar yang diterimanya melalui proses pengaruh-mempengaruhi.

Perilaku menyimpang dapat juga diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada didalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun ditengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai denganaturan (norma) yangberlaku pada masyarakat, misalnya seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain. Penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi pada kalangan remaja dikarenakan ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto Pengendalian sosial merupakan suatu proses, baik terencana maupun tidak terencana, yang tujuannya untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi nilai dan aturan yang berlaku. Sementara itu, menurut Joseph S. Roucek, makna sebenarnya dari kontrol sosial jauh lebih luas, karena pengertian ini juga mencakup semua proses mendidik, mengajak bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi norma dan nilai sosial, baik yang direncanakan maupun tidak. Berlaku Objek (objective) kontrol sosial merupakan perilaku masyarakat itu sendiri. Pengawasan bertujuan agar kehidupan

masyarakat dapat terselenggara sesuai dengan pola dan prinsip yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. (1) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; (2) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan (3) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni: (1) Pengendalian kelompok terhadap kelompok, (2). Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan (3). Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya. Selanjutnya, Koentjaraningrat sekalipun dalam tulisan di sini tidak merumuskannya dalam bentuk definisi, tetapi setidaknya pandangan beliau dapat memberikan gambaran /pengertian kepada kita tentang fungsi pengendalian sosial. Koentjaraningrat menyebut setidaknya ada lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu: (1) Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma, (2) Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, (3). Mengembangkan rasa malu, (4). Mengembangkan rasa takut, dan (5) Menciptakan sistem hukum.

Kontrol sosial di dalam arti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi merupakan sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga

masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut (Mudzhar, 2012).

BAB 13
Perubahan Sosial dan Budaya dalam Masyarakat

Pengertian Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan, dalam perihal ini dibaca sebagai kesempatan sosial, merupakan kejadian- kejadian yang tidak terduga- duga, pada dasarnya bisa terjalin lewat dialektika antara agen, individual ataupun sosial, serta struktur sosial, pola- pola interaksi dengan konstren terhadap aksi dalam fenomena sosial makro, di bermacam tingkatan, mikro- mezo- makro. Lewat dialektika ini, isu kekuasaan, sebagai konsekuensi interaksi antara agen, struktur sosial, serta kesempatan sosial, tumbuh di 2 tataran, yang bersifat keagenan(agentic), bentuk-bentuk kekuasaan yang separuh sistemik serta separuh keagenan, merupakan keahlian agen buat membentuk keadaan sosial ke sesuatu arah, serta objektif, yang dikira "benar" (Sibeon, 2004). Isu kekuasaan yang tumbuh dari perbedaan- perbedaan sosial (*social distinctions*) serta proses- proses perbedaan dalam perihal ini senantiasa bersinergi dengan kedatangan resistensi, sebagai cara- cara dominasi ataupun perlawanan satu pihak terhadap pihak lain yang dapat muncul dalam tingkatan wacana, bahasa, dan ritual, serta konflik, merupakan dualisme serta klaim- klaim atas kekuasaan (Saifuddin, 2006).

Model kekuasaan di tataran keagenan bisa nampak dari misalnya dari pemikiran Max Weber yang merumuskan kekuasaan sebagai mungkin seseorang aktor ataupun sekelompok aktor dalam sesuatu hubungan sosial mengambil posisi buat mewujudkan ambisinya terlepas dari resistensi yang dihadapinya; dengan demikian berpotensi buat melahirkan konflik. Sedangkan, model kekuasaan di tataran objektif bisa nampak misalnya dari pemikiran Michel Foucault yang merumuskan kekuasaan setidak- tidaknya dalam 3 ruang lingkup. Pertama, kekuasaan secara umum bersifat

spontan serta tidak perhitungan, terletak di mana- mana, dapat nampak di tingkatan agen ataupun struktur sosial. Kedua, kekuasaan yang bersifat terstruktur yang misalnya dilakukan oleh negara, mencakup kebijakan ataupun aksi ataupun mekanisme peraturan serta kontrol ataupun sosialisasi ataupun internalisasi. Ketiga, kekuasaan merupakan wacana di mana proses konstruksi serta rekonstruksi pemaknaan merupakan praktek diskursif buat mengindetifikasi permasalahan, intervensi, respons, serta pemecahan. (Sibeon, 2004 ; Rabinow et al., 2008 ; Alan, 2005) Sehubungan dengan saling hubungan antara agen, (Sifatu, 2014) struktur sosial, serta pergantian, perspektif tentang kekuasaan yang bertabiat sistemik serta relasional bisa merupakan gabungan antara kekuasaan yang bersifat keagenan serta objektif. Kekuasaan keagenan bisa berangkat dari peranan ataupun posisi agen ataupun interaksi sosial di tingkatan mikro ataupun mezo serta dari wacana, lembaga sosial, serta sistem sosial ataupun jejaringan sosial.

Pengertian Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial dikemukakan oleh para pakar dengan aksentuasi yang berbeda- beda, cocok dengan sudut pandangnya masing- masing. Terlepas dari perbandingan pemikirannya, yang jelas, para pakar setuju kalau perubahan sosial terkait dengan warga serta kebudayaan dan dinamika dari keduanya.

Ogburn tidak berikan definisi tentang perubahan- perubahan sosial, melainkan membagikan penafsiran tertentu tentang perubahan- perubahan sosial itu. Ia mengemukakan kalau ruang lingkup perubahan- perubahan sosial meliputi unsurunsur kebudayaan baik yang material ataupun yang non- material. Yang ditekankannya merupakan pengaruh besar unsur- unsur kebudayaan material terhadap unsur- unsur non- material (Soekanto & Sulistyowati, 2002). Dengan pengertian ini sesungguhnya Ogburn ingin berkata kalau perubahan-perubahan sosial terkait dengan unsur- unsur raga serta rohaniah manusia akibat pertautannya dengan dinamika manusia sebagai sesuatu keseluruhan. Pergantian pola pikir, pola perilaku serta pola tingkah laku manusia (yang

bertabiat rohaniah) lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bertabiat material.

Misalnya kondisi- kondisi ekonomis, geografis, ataupun biologis (unsur-unsur kebudayaan material) menimbulkan terbentuknya perubahan- perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial yang lain (pola pikir, pola perilaku, serta pola tingkah laku). Pengertian tentang perubahan sosial pula dikemukakan oleh Gillin dan Gillin. Kedua pakar ini berkata kalau perubahan-perubahan sosial sebagai sesuatu alterasi dari cara-cara hidup yang sudah diterima, baik sebab pergantian keadaan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, pandangan hidup ataupun sebab terdapatnya difusi maupun penemuan- penemuan baru dalam warga (Soekanto & Sulistyowati, 2002).

Pengertian yang dikemukakan oleh Gillin serta Gillin ini menunjuk pada dinamika warga serta reaksinya terhadap area sosialnya baik menyangkut tentang cara dia hidup, keadaan alam, metode dia berkebudayaan, dinamika kependudukan ataupun filsafat hidup yang dianutnya sesudah dia menciptakan hal- hal baru dalam kehidupannya. Pendapat Gillin dan Gillin ini tidak berbeda jauh dengan komentar Koenig yang berkata jika perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjalin dalam pola- pola kehidupan manusia (Marius, 2006) .

Perubahan sosial di warga sangatlah berefek pada pola hidup warga saat ini paling utama dlam perihal perilaku serta sikap karena manusia yang merupakan makhluk sosial serta pergantian tersebut bisa terus mengganggu hendak perilaku sosial warga di sesuatu negeri apalgi di masa saat ini makluk sosial telah tidak sejatinya sosial serta apalagi banyak orang mersa sanggup hidup sendiri tanpa terdapatnya dorongan dari makhluk lain. Serta pergantian sosial ini sangatlah butuh di jaga supaya presepsi ideologi setiap warga indonesia terus menjadi baik serta tidak langsung mengolah mentah mentah tentang perubahan peradapan sosial saat ini yang bisa jadi sangat gampang melalui sosial media yang sangat mudah di akses di masa saat ini di bermacam golongan oleh sebab itu kedudukan dan dampingan bermacam pihaklah yang bisa menyaring serta menetralisir perubahan tersebut sampai bisa seimbang di masyarakat.

Pengertian Perubahan Budaya

Di tengah- tengah perubahan serta kekuasaan yang membayangi kedekatan aktor- struktur- mikro- makro dalam kebudayaan hendak menempatkan sorotan terhadap pranata keagamaan bisa konstelasi kepentingan dunia masa saat ini. Untuk itu penelusuran bermacam pemikiran sehubungan dengan keadaan antropomorfisme (*anthropomorhism*), merupakan faktor kemanusiaan yang didatangkan buat mengambil alih yang bersifat supernatural. (Crapo et al., 2002) Penelusuran sebagian pemikiran tentang pranata keagamaan, di antara lain Herbert Spencer, Emile Durkhein, Max Weber, serta Clifford Geertz, bisa diletakkan lewat kerangka pergantian serta kekuasaan yang mengaitkan aktor-struktur- mikro- makro dalam perspektif kebudayaan. Contoh etnografi yang mengenakan paradigma kekuasaan merupakan *Power Plays: Wayang Golek Puppet Theater of West Java* (Weintraub, 2004). Riset dilakukan Andrew N. Weintraub di Bandung serta Jelekong(berlokasi dekat 2 puluh kilometer di Selatan Bandung) sepanjang enam belas bulan (1994-1995) serta 2 bulan di masa kemarau (1999 serta 2001). Weintraub membahas mengenai wayang golek dengan subjek penelitiannya merupakan dalang populer Asep Sunarya yang bertempat tinggal di Jelekong. Berbeda dengan tulisan Scott yang jelas- jelas membagikan pendapat pribadinya, Weintraub tidak sangat kentara menerangkan keberpihakannya kepada dalang Asep Sunarya yang melakukan (Sifatu, 2014).

Ogburn lewat tesis utamanya memandang kalau bermacam berbagai kebudayaan moderen tingkatan pertumbuhan serta kecepatannya tidak sama, terdapat yang lebih kilat serta terdapat yang lebih lelet, pergantian kilat pada sesuatu kebudayaan memunculkan kebutuhan penyesuaian lewat perubahan lain, lewat bermacam berbagai korelasi ikatan tiap kebudayaan. Analisis pergantian sosial budaya pula sudah dicoba Pitirin Sorokin (dalam Munandar, 1981).

Di lain pihak, sosiolog Indonesia, Selo Soemardjan lebih memandang pergantian sosial itu dari kaca mata pergantian lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu warga. Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan itu pengaruhi sistem sosialnya tercantum di

dalamnya nilai- nilai, perilaku, serta pola sikap di antara kelompok-kelompok dalam warga. Pengertian perubahan sosial bagi Soemardjan ini tidak berbeda jauh dengan Kingsley Davis yang mengartikan pergantian sosial sebagai perubahan- perubahan yang terjalin dalam struktur serta guna warga (Soekanto & Sulistyowati, 2002).

Kala struktur warga berganti, hingga fungsi serta kedudukan, pola pikir serta pola sikap warga pun berubah. Penafsiran pergantian sosial bagi Soemardjan serta Davis ini erat sekali kaitannya dengan pemikiran klasik Durkheim (Sunarto, 2004) tentang pertumbuhan warga dari sistem yang berkarakteristik mekanik (yang penuh kekeluargaan, keintiman, tiap- tiap orang bisa penuhi kebutuhannya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang, belum terdapatnya spesialisasi pekerjaan, terdapatnya pemahaman kolektif bersama) ke sistem warga yang berkarakteristik organik.

Perubahan sosial yang oleh Soemardjan serta Davis lebih menekankan pada perubahan struktur kelembagaan dalam warga yang pengaruhi sistem sosialnya(pergantian nilai- nilai, norma, perilaku, serta tingkah laku) serta pula perubahan sistem kemasyarakatan dari pola mekanik jadi organiknya Emile Durkheim ataupun perubahan dari Gemeinschaft jadi Gesselschaftnya Ferdinand Tonnies merupakan pula indikasi perubahan sosial pada perpindahan penduduk dari desa ke kota (Marius, 2006).

BAB 14

Organisasi Tradisional dan Modern

Pengertian Organisasi Tradisional dan Modern

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, merupakan organon ataupun "alat". Dalam lingkup ilmu- ilmu sosial, organisasi dipelajari sebagai objek riset oleh antara lain ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, serta manajemen. Secara konseptual ada 2 penafsiran yang berbeda untuk sebutan organisasi (organization) sebagai kata barang, merupakan wadah sekelompok orang buat menggapai tujuan bersama serta pengorganisasian (organizing) sebagai kata kerja, merupakan sesuatu proses serta serangkaian kegiatan yang dicoba secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun serta meningkatkan organisasi ataupun sebagai salah satu fondasi manajemen. Sebagai suatu pengantar untuk mahasiswa kearsipan, penjelasan dasar atas konsep serta teori organisasi sangat dibutuhkan. Dengan menguasai fungsi, struktur, serta rentang tugas dari suatu organisasi, misalnya, sangat berguna kala arsiparis hendak menentukan sistem klasifikasi arsip yang hendak ditangani.

Pengertian Organisasi

Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa latin merupakan *organizare*. Setelah itu dalam bahasa Inggris merupakan *organize* yang berarti membentuk sesuatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama yang lain.

Pengertian organisasi menurut Dimock & Pane (1992) : "Organisasi merupakan perpaduan secara sistematika dari bagian-bagian yang saling tergantung ataupun berkaitan buat membentuk satu kesatuan yang bulat lewat kewenangan, koordinasi serta pengawasan dalam rangka usaha guna menggapai tujuan yang sudah

didetetapkan. Sedangkan itu, komentar yang lain tentang organisasi merupakan menurut Goleman & Hermaya (1996) Organisasi merupakan tempat ataupun wahana proses aktivitas kumpulan orang- orang yang bekerja sama memiliki guna serta wewenang buat mengerjaka usaha menggapai tujuan yang sudah didetetapkan.

Definisi organisasi kerapkali diformulasikan cocok kepentingan serta tujuan riset dan bergantung pada konteks serta perspektif keilmuan dari seorang yang merumuskannya. Ada puluhan ataupun apalagi bisa jadi lebih mengenai definisi organisasi (Sobirin, 1957). Sebagai contoh, berikut beberapa definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan.

Dalam buku Ernawan (2011), dilansir penafsiran organisasi dari Mathis and Jackson sebagai berikut: "Organisasi merupakan sesuatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang silih berhubungan bagi sesuatu pola tertentu sehingga tiap anggota organisasi mempunyai guna serta tugasnya masing- masing, sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu serta memiliki batas- batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan".

Dalam buku (Hasibuan, 2014), ada kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Louis A. Allen:" Organisasi sebagai proses penentuan serta pengelompokkan pekerjaan yang hendak dikerjakan, menetapkan serta melimpahkan wewenang serta tanggung jawab dengan maksud untuk membolehkan orang- orang bekerja sama secara efisien dalam menggapai tujuan".

Karakteristik Organisasi

Organisasi memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu sebagai berikut:

a) Tiap organisasi memiliki tujuan yang khas. Tiap organisasi didirikan pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai.
b) Tiap organisasi terdiri dari orang-orang. Seseorang yang bekerja sendirian bukanlah suatu organisasi. Diperlukan orang supaya dapat melakukan pekerjaan yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai sasarannya.
c) Organisasi mempunyai struktur yang tersusun. Organisasi membutuhkan struktur yang tersusun agar hubungan kerja para anggotanya diperjelas dan mereka dapat melakukan perkerjaannya dengan maksimal.

Ciri-ciri Organisasi Tradisional dan Modern

Ciri – ciri Organisasi Tradisional :

a) Stabil
b) Tidak fleksibel
c) Berfokus pada pekerjaand
d) Pekerjaan di defiinisikan berdasarkan posisi pekerjaan
e) Berorientasi individu
f) Pekerjaan yang tetap
g) Berorientasi perintah
h) Manajer selalu membuat keputusan
i) Berorientasi peraturan
j) Tenaga kerja yang relatif homogen
k) Hari kerja ditentukan dari jam 9 sampai jam 5
l) Hubungan hirarki
m) Bekerja di fasilitas organisasi selama jam kerja tertentu

Pengertian Organisasi modern terlihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan. Organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat Organisasi merupakan sebuah wadah atau tempat untuk berkumpulnya seseorang atau kelompok dengan tujuan yang sama dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Menurut Boone dan Katz, organisasi merupakan suatu proses yang tersusun dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan danapabila organisasi dapat bertahan hidup maka ia harus bisa beradaptasi denganlingkungan.

Ciri-ciri Organisasi Modern sebagai berikut

a) Bersifat dinamis
b) Bersifat fleksibel terhadap kondisi yang terjadi dan dalam lingkungan dimana organisasi tersebut berada
c) Suatu pekerjaan akan didefinisikan sebagai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pihak yang berwewenang

d) Keterampilan lebih diutamakan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan
e) Pengelolaan terhadap tim lebih diutamakan
f) Seluruh anggota ikut terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan
g) Pekerjaan dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun
h) Hubungan bersifat dua arah dan terarah
i) Lingkungan kerja yang bersifat heterogen
j) Lebih menekankan pada perpaduan dan perancangan, sehingga bersifat menyeluruh
k) Bersifat dinamis, sangat kompleks, multilevel, multidimensi dan banyak yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

Sebuah organisasi harus memiliki kejelasan terhadap visi dan misi yang akan tertarget, sehingga masing-masing anggota dapat dengan mudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, selain harus memiliki visi misi yang jelas juga harus memiliki struktur jabatan yang jelas, sehingga pembagian tugas dapat dilakukan dengan baik berdasarkan jabatan yang dimiliki. Persyaratan organisasi agar dapat yang menjadi sistem yang sepenuhnya. Menurut Dalton ada 4 elemen pokok:

1. Harus ada produksi baik barang maupun jasa
2. Harus ada usaha penjualan yang menjamin penyampaian barang atau jasa kepada mereka bagi siapa perancang barang atau jasa itu. diperuntukkan dan bila perlu untuk merangsang permintaan.
3. Harus ada usaha perancangan dan pengembangan memastikan bahwa prodak dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dansesuai dengan perubahan yang terjadi pada kebutuhan itu.
4. Mengikat ketiga elemen diatas menjadi padu yaitu sistem administrasi dan pengendalian yang mengandalkan komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan.

Tujuan Pengorganisasian Sesuai dengan salah satu ciri- ciri dari pengorganisasian, maka setiap organisasi harus memiliki tujuan. Berikut merupakan tujuan pengorganisasian, yaitu:

a. Membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke sejumlah departemen dan pekerjaan tertentu

b. Membagi-bagi tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing pekerjaan
c. Mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi
d. Mengelompokkan sejumlah pekerjaan ke sejumlah unit
e. Membangun hubungan di antara individu, kelompok, dan departemen
f. Menetapkan sejumlah garis wewenang formal
g. Mengalokasikan dan menggunakan secara efektif sumber daya organisasi.

Komponen Organisasi

Komponen penting organisasi meliputi hal-hal berikut:

1. Tujuan

Merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu, Tujuan berdasarkan rentang dan cakupanya dapat di bagi dala beberapa karakteristik antara lain :

1. Tujuan Jangka panjang
2. Tujuan Jangka menengah dan
3. Tujuan Jangka pendek

2. Struktur

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efesien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur

organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal.

3. Sistem

Setiap organisasi baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosesdur dan peraturan lainnya. Pada organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan sekalipun tidak sekompleks peraturan pada organisasi besar. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi. Pada organisasi monarki, sistem itu berupa kekuasaan mutlak yang berada di tangan raja. Raja mengatur segala aspek dan membuat peraturanperaturan. Raja berperan sebagai pusat (sentral) segala aspek di dalam organisasi kerajaan. Organisasi demikian dapat disebut dengan organisasi yang diatur oleh orang (*ruled by person*).

Contoh-Contoh Organisasi

Berikut merupakan contoh -contoh organisasi di masyarakat:

1. Partai Politik

   Partai politik ini merupakan organisasi partai-partai yang fokus untuk kebijakan masyarakat luas. Di Indonesia banyak sekali partai politik.

2. Panti Asuhan

   Organisasi ini merupakan salah satu contoh lembaga yang peduli terhadap generasi penerus bangsa yang sudah tidak memiliki orang tua dan memberikan titik cerah kepada mereka.

3. Koperasi Simpan Pinjam

   Organisasi ini mendukung perekonomian masyarakat karena dalam organisasi ini mengadakan operasi simpan pinjam.

BAB 15
Masalah Sosial dan Peranan Sosiologi dalam Masyarakat

Pengertian masalah sosial dan sosiologi

Kehidupan masyarakat sejatinya selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Dalam proses perubahan tersebut, terkadang muncul kondisi yang tidak diharapkan atau tidak seharusnya terjadi. Kondisi yang tidak diharapkan tersebut lama kelamaan menjadi polemik dan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi inilah yang disebut sebagai masalah sosial.

Dilansir dari buku Sosiologi Suatu Pengantar karya dari Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial timbul akibat perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. sumber utama masalah sosial biasanya berupa proses-proses sosial serta gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Ketika proses sosial dan gejala sosial memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, maka proses sosial dan gejala sosial tersebut dapat berubah menjadi masalah sosial.

Masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Contoh masalah sosial yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat merupakan kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial ekonomi. Suatu gejala bisa dikatakan masalah

sosial apabila memenuhi beberapa syarat. Dalam buku Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal karya Masrizal, dijelaskan beberapa syarat tersebut yaitu:

a. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang tertentu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok.
b. Sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok tertentu telah menyebabkan terjadinya disintregasi kehidupan dalam kelompok.
c. Sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok tertentu telah memunculkan kegelisahan dan ketidakbahagiaan bagi individu lain dalam kelompok.

Dalam buku Pengantar Sosiologi karya Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, dijelaskan bahawa faktor penyebab kemunculan masalah sosial dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

   Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor ekonomi merupakan pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan.

b. Faktor Budaya

   Dalam faktor ini, masalah sosial yang muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya merupakan westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor dan lain sebagainya.

c. Faktor Biologis

   Masalah sosial karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Misalnya muncul penyakit menular, gizi buruk dan lain sebagainya.

d. Faktor Psikologis

   Masalah sosial karena faktor psikologis biasanya berhubungan dengan gangguan psikologis yang dialami suatu masyarakat. misalnya gangguan jiwa, depresi dan lain-lain. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu memiliki beberapa arti. Secara harfiyah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin

Socius dan *Logos*. Socius berarti teman, atau sahabat. Sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan.

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang obyeknya merupakan masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Disebut ilmu pengetahuan karena pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian yang mendalam, menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah merupakan segala cara yang dipergunakan oleh sesuatu ilmu untuk sampai kepada pembentukan ilmu menjadi suatu kesatuan yang sistematis, organis, dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat antara lain:

a. Jelas obyek yang dibahas sehingga berbeda dengan ilmu lain
b. Mempergunakan metode-metode ilmiah
c. Tersusun secara sistematis

Sosiologi dapat memenuhi syarat disebut sebagai ilmu karena:

a. Memiliki obyek yang jelas, yakni masyarakat struktur, unsur, proses dan perubahan sosial
b. Mempergunakan metode-metode ilmiah
c. Merupakan hasil penelitian/penelaahan sosiologi yang tersusun menjadi satu kesatuan yang bulat, sistematis, logis, saling berhubungan, sehingga membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya.

Sejak awal perkembangannya, pada awal abad ke-19 hingga dewasa ini, ilmu sosiologi telah mengalami perubahan yang terus menerus, ilmu yang oleh Auguste Comte disebut dengan *social physics* yang kemudian dikenal dengan sosiologi (Sosiology). Sosiologi terus berkembang seiring dengan perubahan yang timbul di masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu murni (*pure science*) yakni ilmu yang dimaksud penelitiannya semata-mata untuk kepentingan ilmu itu sendiri, tidak dimaksudkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari, misalnya ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu alam, antropologi, astronomi, ilmu faal dan lain sebagainya.

Masyarakat yang menjadi obyek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkut paut dengan produksi, distribusi dan

penggunaan barang-barang dan jasa-jasa; ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat; dan lain-lain segi kehidupan. Segi ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan materiilnya dari bahan-bahan yang terbatas persediaan pangan dibandingkan dengan jumlah penduduk; ilmu ekonomi juga mempelajari usaha-usaha apa yang harus dilakukan menaikkan produksi bahan sandang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lain-lainnya. Sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan.

Sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum daripadanya. Misalnya daya-daya untuk mendapatkan kekuasaan digambarkan oleh sosiologi sebagai salah satu bentuk persaingan (competition) atau bahkan pertikaian (conflict). Demikian juga dengan cabang ilmu sosial lainnya. Sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial

   Maksudnya merupakan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial (kemasyarakatan), dan bukan mempelajari gejala-gejala alam. Sosiologi merupakan ilmu sosial sepenuhnya.

b. Sosiologi bersifat kategoris

   Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif akan tetapi merupakan sesuatu disiplin kategoris, artinya sosiologi membicarakan obyeknya secara apa adanya, dan bukan bagaimana seharusnya. Misalnya sosiologi mengatakan bahwa struktur masyarakat suatu daerah berbentuk demikian (apa adanya), dan tidak mengatakan bahwa struktur masyarakat di daerah tersebut seharusnya begini atau begitu. Hal ini bukan berarti pandangan-pandangan sosiologi tidak akan berguna bagi kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik, akan tetapi pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa yang buruk dan apa yang baik segala sesuatu yang bersangkutan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sosiologi dapat menetapkan bahwa masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai

yang tertentu, akan tetapi selanjutnya tidak dapat ditentukan bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya.

c. Sosiologi termasuk ilmu murni (*pure science*)

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni (*pure science)* dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai (*applied science*). Perlu dicatat bahwa dari sudut ilmu penerapannya ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bagian ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan murni adala ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa menggunakannya. dalam masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dengan maksud membantu kehidupan masyarakat.

d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkrit. Artinya, bahwa yang diperhatikannya merupakan bentuk dan pola-polaperistiwa dalam masyarakat tetapi bukan wujudnya yang konkrit.

e. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertiandan pola-pola umum. Sosiologi meneliti danmencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukumumum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakiki, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia.

f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris danrasional. Ciri tersebut menyangkut soal metode yang dipergunakannya.

g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum danbukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang umum ada pada setiap interaksi antar manusia.

BAB 16
Masyarakat Informasi dan Net Generation di Era Post-Industrial

Masyarakat Informasi Pasca-Industry (Post-Industrial)

Melalui karyanya yang berjudul *The Coming of Post-Industrial 1976* Daniel bell meramal akan adanya masyarakat pasca industrial. Dalam karyanya tersebut bell menyebutkan bahwa basis kekuatan masyarakat post-industrial berbeda dengan dua jenis masyarakat sebelumnya,yaitu masyarakat pra-industri dan masyarakat industri. Bila kekuatan utama masyarakat pra-industri terletak pada sumber daya alam, terutama lahan, dan masyarakat industry pada mesin, maka pada masyarakat post-industrial Bell berpendapat bahwa informasi serta teknologi informasilah sebetulnya yang menjadi kekuatan utama penggerak dinamika masyarakat dan perubahan sosial. Tanpa memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dan dukungan teknologi informasi boleh dikatakan tidak akan mungkin masyarakat mampu bertahan dan *survive* dalam melangsungkan kehidupannya.Bisa dibayangkan di era sekarang ini bagaimana mungkin interaksi masyarakat di era global dan perkembangan sector perekonomian bisa berlangsung jika tidak didukung teknologi informasi (Suyanto & Narwoko, 2004).

Berkembangnya penggunaan informasi dalam kehidupan membawa banyak perubahan. Penggunaan informasi yang intensif dalam berbagai bidang merupakan tanda mulainya era informasi, orang-orang secara intens menggunakan informasi sebagai acuan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang tersebut akhirnya membentuk komunitas dan menjadi masyarakat. Hingga pada akhirnya muncullah istilah masyarakat informasi. Masyarakat informasi banyak didefinisikan oleh para pakar informasi sehingga tidak ada satu definisi yang dijadikan baku. Namun

secara garis besar masyarakat informasi merupakan masyarakat yang menggunakan informasi sebagai petunjuk utama dalam menjalankan kehidupannya. Ciri utama masyarakat informasi merupakan masyarakatnya yang sudah peka oleh penggunaan informasi, baik itu mengenai akses dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Derap laju kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan pertumbuhan informasi yang begitu eksponensial menghadirkan kebutuhan baru dalam bermasyarakat. Masyarakat yang semakin haus informasi membutuhkan negara untuk menghadirkan informasi ke hadapan masyarakat. Masyarakat menjadi semakin ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan negara. Sesuatu yang sebelum era informasi bukan menjadi urusan besar bagi masyarakat. Keterbukaan tersebut dikenal sebagai keterbukaan informasi (Noor, 2019).

Secara sosiologis, perkembangan bentuk media komunikasi senantiasa sebanding lurus dengan tingkat kecanggihan masyarakat. Mulai dari dominasi komunikasi dalam bentuk lisan pada masyarakat tribal menjadi komunikasi tulis pada masyarakat scribel. Selanjutnya mengandalkan mesin pengganda informasi pada masyarakat mekanik yang merupakan cakupan dari tipologi masyarakat scribel. Hingga era paling canggih dari masyarakat elektronik yang ditandai dengan kemudahan akses informasi melalui jejaring internet dalam genggaman tangan (Mashud, 2015). Alhasil, perubahan wujud pola komunikasi dari masa ke masa merupakan determinasi dari dinamika kemajuan sosial. Di sisi lain, penemuan teknologi informasi dan komunikasi juga berlaku timbal-balik bagi perubahan sosial. Tak pelak lagi, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan sebuah era yang disebut "Net Generation". Berbeda dengan era masyarakat yang akrab dengan media seperti televisi dan Koran. Net Generation yang ditandai dengan kemudahan teknologi informasi akan semakin aktif mengelolah sebuah informasi.

Di era masyarakat post-industrial yang didominasi teknologi informasi yang terjadi sesungguhnya bukan hanya perubahan pada pola interaksi sosial dan cara berkomunikasi yang dikembangkan masyarakat melainkan juga perubahan sikap dan perilaku masyarakat menyikapi realitas sosial yang ada di sekitarnya. Realitas sosial saat

ini tidak lagi dipahami masyarakat sekdar sebagai objek atau hal-hal yang diamati tetapi sudah menjadi suatu hal yang melewati atau melampaui relaitas itu sendiri(R. Sugiharti, 2014: 40). Diera revolusi informasi masyarakat masih berinteraksi satu sama lain dengan baik,tetapi kini tidak lagi didalam komunitas yang nyata tetapi didalam komunitas virtual. Internet sebagai satu bentuk jaringan informasi global yang telah menawarkan bentuk komunitas sendiri,bentuk realistasnya sendiri, bentuk ruangnya sendiri sekaligus melahirkan konsekuensi sosial yang mungkin tidak terbayangkan akan terjadi sebelumnya.

Perubahan masyarakat post modernitas yang dihela perkembangan teknologi unformasi sebagai suatu trend an sebagai awal dari suatu era baru yang dibawa oleh makin maraknya komunikasi bermediasi, konsumsi simbolis dan semakin mempatnya ruang dan waktu. Peran media massa terutama budaya popular dan iklan yang makin signifikan. Jika era pramodern ditandai dengan logika pertukaran simbolik dan era modern ditandai dengan logika produksi maka kini tengah menjelang era baru yakni post modern yang ditandai dengan logika informasi. Masyarakat modern berkutat di seputar produksi dan konsumsi komoditas. Akibat semakin majunya teknologi informasi terutama system komputerisasi kini boleh dikatakan apapun bisa diciptakan direkayasa seolah sama seperti aslinya.

Di era masyarakat post-industrial yang disebut ruang public juga bisa disebut sebagai *agora electronic*. Agora merupakan suatu pasar yang berkembang di Athena yang berfungsi sebagai tempat bagi warga untuk berkumpul ,berbincang, bergosip, dan berdialog mencari solusi atau titik temu menciptakan konsesnsus dan menemukan titik lemah gagasan-gagasan politik yang ada dengan mendebatnya. Sementara itu yang disebut *agro electronic* merupakan ruang dalam *cyberspace* yang menjadi arena bagi seluruh warga masyarakat atau komunitas *cyber* untuk menyampaikan apapun aspirasi sosial politik mereka. (R. Sugihartati, 2014: 53).

Dengan semakin berkembangnya informasi tentu teknologi juga ikut berkembang. Banyak keuntungan bisa diperoleh dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi akan meningkatkan dan menghasilkan suatu program. Sebagai contoh, program parenting

yang dikemas dalam bentuk serial televisi dapat menjangkau masyarakat luas dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman atau di tempat yang terisolasi karena malu atau takut bahwa dirinya memiliki permasalahan psikolog. Selain itu, program televisi yang memberikan informasi mengenai perilaku bermasalah pada anak. Dengan demikian, Apabila orang tua

Selain masyarakat informasi yang diungkapkan oleh David Bell seorang tokoh terkenal yang bernama Manuel Castells mengemukakan pendapatnya mengenai masyarakat jaringan. Menurut Castells, pada dasarnya, 'jaringan' merupakan bentuk pengorganisasian yang tidak baru. Di satu sisi, jaringan memudahkan organisasi untuk adaptif dan fleksibel terhadap lingkungan yang berubah. Namun di sisi lain, sifat jaringan menyulitkan fungsi koordinasi dan fungsi optimalisasi sumberdaya pada tujuan tertentu dalam mengelola kompleksitas lingkungan. Namun Castells menyatakan, sejak adanya teknologi informasi, jaringan tetap dapat flesksibel sehingga lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sementara pada saat bersamaan, jaringan yang ditopang teknologi informasi memungkinkan koordinasi dan mengelola kompleksitas dalam suatu sistem interaksi timbal-balik dan pola komunikasi dari manapun dan kapanpun. Dalam logika jaringan, pekerjaan dilakukan secara terdesentralisasi, kewenangan pengambilan keputusan dibagi kepada titik-titik yang terjalin dalam jaringan. Tidak ada pusat dalam konteks seperti ini. Jaringan bekerja menggunakan logika binari, inklusi atau eksklusi. Semua yang terhubung dalam jaringan dianggap berguna dan penting bagi jaringan. Sementara yang diluar jaringan dianggap tidak ada. Titik-titik yang berada di luar jaringan mesti dianggap tidak relevan bagi kepentingan jaringan. Bahkan perlu dimusnahkan jika berpotensi mengganggu pencapaian tujuan jaringan. Anggota atau titik-titik dalam jaringan yang 'tidak bekerja' akan diganti dengan titik baru. Dari sinilah muncul susunan jaringan baru. Kegiatan investor memindahkan investasinya dari satu negara (titik) ke negara (titik) lain merupakan contoh konkret perubahan susunan jaringan ini (Mohtar Habibi, 2011: 102-103).

Berbeda dengan Daniel Bell yang memprediksi kehadiran masyarakat informasional dari struktur pekerjaan yang cenderung

makin didominasi pekerjaan di sector jasa. Castells menganalisis perubahan yang terjadi di masyarakat sesungguhnya merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang mempunyai efek pervasif dan arti penting teknologi informasi itu sendiri yang mampu mengembangkan logika jaringan di era perkembangan perekonomian dan kehidupan masyarakat yang makin mengglobal. Menurut pengamatan Castell di negara-negara maju muncul apa yang disebut dengan ekonomi internasional global baru yang semakin menguntungkan dan ekonomi ini bersifat informasional karena produktivitas dan daya saing dari unit dan agen dalam eknomi ini secara mendasar tergantung pada kapasitas mereka untuk menghasilkan memproses dan mengaplikasikan pengetahuan dan informasi secara efisien melalui dukungan teknologi dan informasi yang ada (A. Ramlan dkk, 2004: 352-352).

Masyarakat jaringan jauh lebih didepan dibandingkan dengan masyarakat informasi yang sering proklamirkan. Castells berpendapat bahwa tidak selalu faktor teknologi yang dapat membedakan masyarakat modern, tetapi juga faktor budaya, ekonomi dan politik yang membentuk suatu masyarakat jaringan. Pengaruh lain seperti agama, budaya, pendidikan, organisasi politik, dan status sosial merupakan faktor lain yang membentuk masyarakat jaringan. Masyarakat dibentuk oleh faktor-faktor ini dalam banyak cara. Pengaruh-pengaruh ini dapat meningkatkan atau menghalangi masyarakat tersebut. Bagi van Dijk, informasi membentuk hakikat dari masyarakat kontemporer, sementara jaringan membentuk susunan organisasi, dan infrastruktur masyarakat. Selain perusahaan jaringan muncul pula perkembangan kebudayaan virtual rill, yaitu suatu system di mana realitas itu sendiri sepenuhnya tercakup dan sepenuhnya masuk kedalam setting citra maya, di dunia fantasi, yang didalamnya tampilan tidak hanya ada di tempat dikomunikasikannya pengalaman, tetapi tetapi juga dalam dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat, sehingga muncullah suatu pola masyarakat baru. Castells mengemukakan bahwa hal baru pada era masyarakat ini dimulai oleh sesuatu yang sederhana, yakni teknologi. Hal ini bukan berarti bahwa teknologi dapat menciptakan masyarakat, melainkan teknologi

merupakan bagian dari masyarakat. Castells menjelaskan bahwa teknologi informasi baru bukanlah penyebab dari adanya transformasi sosial, tetapi tanpa adanya teknologi, proses yang mengarah pada transformasi sosial tidak dapat terjadi. Oleh karenanya teknologi dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat sekarang. Salah satu teknologi yang sering digunakan merupakan internet. Internet merupakan produk teknologi yang banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi maka internet dapat memunculkan jenis interaksi sosial yang berbeda dengan interkasi sosial sebelumnya. Jika pada masa lalu masyarakat berinteraksi di dalam dunia maya melalui interaksi secara online melalui internet (Alyusi, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W. (2008). *IPS sosiologi untuk SMP/MTs kelas IX*. Grasindo.

Abdulsyani. (1994). *Sosiologi : Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=257866

Alyusi, S. S. (2016). *Media Sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* . Kencana Prenada Media Grup. https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=3123

Amalia, G. (2019). Pengelolaan Konflik Secara Positif Bagi Individu Maupun Organisasi . *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *12*(2). https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/3297

Arsyad, & Lincolin. (1988). *Ekonomi Pembangunan* . STIE-YKPN.

Asiah, S. (2018). *Manajemen Pendidikan Islam* . Pustaka Cendekia.

Azhar, Basyir, D. M., & Alfitri. (2015). Hubungan Pengetahuan dan Etika Lingkungan Dengan Sikap dan Perilaku Menjaga Kelestarian Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *13 (1)*. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/10544/8388

Basrowi. (1968). *Pengantar Sosiologi* . Ghalia Indonesia. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=617575

Bertens, K. (2017). *Etika* . Gramedia. https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Beteille, A. (1977). *Inequality Among Men* . Blackwell. https://www.worldcat.org/title/3241025

Bungin, B. (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif . In *Analisis Data*

Penelitian Kualitatif (Cet. 8). Rajawali Press.

Changara, H. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi* . Raja Grafindo Persada. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135639

Chaplin, J. (2014). *Kamus Lengkap Psikologi*. PT. Raja Grafindo Persada.

Crapo, R. O., Casaburi, R., Coates, A. L., Enright, P. L., MacIntyre, N. R., McKay, R. T., Johnson, D., Wanger, J. S., Zeballos, R. J., Bittner, V., & Mottram, C. (2002). ATS statement: Guidelines for the six-minute walk test. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, *166*(1), 111–117. https://doi.org/10.1164/AJRCCM.166.1.AT1102

Creswell, J. W. (1994). *Research design qualitative & quantitative approaches*. Sage.

Dimock, M. E., & Pane, H. T. (1992). *Administrasi Negara*. Rineka Cipta. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=490380

Djazifah, N. E. (2012). *Proses Perubahan Sosial di Masyarakat*. Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.

Dwiyono, A., Wicaksono, B., Shodiq, M., & Pracaya, B. (2014). *PPKn 1 : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* . Yudhistira. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=870286

Echols, J. M. (John M., & Shadily, H. (1982). *Kamus Inggris Indonesia : an English Indonesian Dictionary* . Palgrave Macmillan.

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *12*(4), 1143–1168. https://doi.org/10.1111/J.1083-6101.2007.00367.X

Ernawan, E. R. (2011). *Organizational Culture: Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta.

Erwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* , *7 (2)*, 24–42. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2414/1600

Fisher, S. (2015). *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak* . The British Council Indonesia-- Zed Books.

Goleman, D., & Hermaya. (1996). *Kecerdasan Emosial* . Gramedia Pustaka. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=442091

Hadiyanti, P. (2006). Kemiskinan & Upaya Pemberdayaan Masyarakat . *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* , 33–45. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=5-0m6kYAAAAJ&citation_for_view=5-0m6kYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Haryatmoko. (2015). *Etika publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Kanisius. https://lib.ui.ac.id

Hasanah, U., & Nadiroh, N. (2017). Pengaruh Diferensiasi Peran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Keinginan Ibu Mengatasi Masalah Lingkungan Keluarga . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, *18*(02), 1–26. https://doi.org/10.21009/PLPB.182.01

Hasbullah. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hasibuan, H. M. S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia : edisi revisi*. Bumi Aksara.

Hendropuspito. (1989). *Sosiologi Sistematik*. Kanisius. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=250131

Herabudin. (2015). *Pengantar Sosiologi*. Pustaka Setia . https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22783

Hisyam, C. J., & Hamid, A. R. (2015). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/sosiologi_prilaku_menyimpang.pdf

Hocker, J. L., & Wilmot, W. W. (1985). *Interpersonal Conflict*. Wm. C. Brown. https://books.google.com/books/about/Interpersonal_Conflict.html?hl=id&id=oSJHAAAAMAAJ

Hoogvelt, A. M. ., & Alimandan. (1985). *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Rajawali Press. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=498512

Hudiarini, S. (2017). Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *2*(1), 1–13. http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK

Irawan, B. (2019). Organisasi Formal dan Informal : Tinjauan Konsep, Perbandingan, dan Studi Kasus . *Jurnal Administrative Reform*, *6*(4), 195–220. https://doi.org/10.52239/JAR.V6I4.1921

Irawan, H. (2018). *Interaksi Sosial*. Aksara Sinergi Media. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1242208

Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya*. Pustaka Setia.

Jarolimek, J. (1967). *Social Studies in Elementary Education.-- Ed.4*. The Macmillan Co.

Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi klasik dan modern Jilid 1*. Gramedia. https://onesearch.id/Record/IOS7783.ai:slims-23407

Kartono, D. T. (2010). *Sosiologi Perkotaan*. Universitas Terbuka.

Kettani, M. A. (2005). *Minoritas Muslim : Di Dunia Dewasa Ini* . Rajagrafindo Persada. https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/37790/Minoritas-muslim-:-di-dunia-dewasa-ini

Khadar, L. I., Al-Kattani, A. H., & Sebi. (2005). *Ketika Barat Memfitnah Islam* . Gema Insani . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=659370

Khaldun, I., & Thoha, A. (1986). *Muqaddimah Ibn Khaldun* . Pustaka Firdaus. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=679759

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2005). *Marketing Management* . Pearson Education.

Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z. (2018). Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *2*(1), 39–50. https://doi.org/10.21580/JSW.2018.2.1.2252

Liliweri, A. (1991). *Komunikasi Antar Pribadi* . Citra Aditya Bakti. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=15061

Lindgren, H. C. (1980). *Great Expectation: The Psychology Of Money*. William Kaufmann.

Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* . Kompas. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=108558

Magnis, F., & Suseno. (2019). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* . Gramedia. https://ebooks.gramedia.com/id/buku/etika-dasar-masalah-masalah-pokok-filsafat-moral

Makhmudah, S. (2019). *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku*

Keagamaan Remaja. Guepedia. https://books.google.co.id/books?id=TXkWEAAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Siti+Makhmudah,+2019.+medsos+dan+dampaknya+pada+perilaku+keagamaan+remaja&source=bl&ots=EAyqm2Re29&sig=ACfU3U3jGx-BMYSSixJjfGzfqdxlUZSPog&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj4zMzezeH5AhWv03MBHS_YBFYQ6AF6BAgSEAM#v=onepage&q=Siti Makhmudah%2C 2019. medsos dan dampaknya pada perilaku keagamaan remaja&f=false

Marius, J. A. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, *2*(2).

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.

Mashud. (2015). Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Era Abad 21. *Jurnal Multilaretal*, *14 (2)*. http://ahmadsudrajad.wordpress.com

Moefad, M. (2007). *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social*. el-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=iO-cdlkAAAAJ&citation_for_view=iO-cdlkAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

Mudzhar, M. A. (2012). Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini 1. *Indo-Islamika*, *2 (1)*.

Mujiburrahmad, & Firmansyah. (2014). Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Sosial dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kasus Kampung Sengked, RT 03/RW 03 Desa Babakan Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor). *Jurnal Agrisep Unsyiah*, *15*(1), 47–66. https://doi.org/10.24815/AGRISEP.V15I1.2092

Mulyadi, S., Rahardjo, W., & Basuki, H. (2016). *Psikologi Pendidikan* . Raja Grafindo Persada.

https://www.rajagrafindo.co.id/produk/psikologi-pendidikan-dengan-pendekatan-teori-teori-baru-dalam-psikologi/

Munandar. (1981). *Budgeting : Perencanaan Kerja Pengkordinasian Kerja Pengawasan Kerja* . BPFE. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=288849

Nas, P. J. M. (1979). *Kota Didunia Ketiga : Pengantar Sosiologi Kota dalam Tiga Bagian*. Bhratara Karya Aksara.

Nasikun. (2008). *Sistem Sosial Indonesia*. Raja Grafindo Persada. https://rajagrafindo.co.id/produk/sistem-sosial-indonesia/

Nata, A. (2017). *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* . Rajawali Press. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968660

Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, *7*(1), 11. https://doi.org/10.24252/KAH.V7I1A2

Pattinasarany, I. R. I. (2016). *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial* . Yayasan Obor Indonesia. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967478

Pawit, M. Y. (2009). *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan*. Bumi Aksara. https://onesearch.id/Record/IOS6530.ai:slims-1746

Polak, J. B. A. . M. (1966). *Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Ichtiar Baru . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=598740

Poloma, M. M. (1979). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali. https://onesearch.id/Record/IOS13916.BHATT-10140000000653

Prameswari, I. P. (2015). Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat

dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013. *Jurnal Politik Muda*, *4 (1)*. http://journal.unair.ac.id/JPM@studi-kasus-tentang-organisasi-masyarakat-dalam-pemilihan-gubernur-bali-2013-article-8691-media-80-category-8.html

Prisgunanto, I. (2017). Aplikasi teori dalam sistem komunikasi di Indonesia. In *Yogyakarta: Zahir Publishing*. Kencana. http://library.stik-ptik.ac.id

Rabinow, P., Marcus, G., Faubion, J., & Rees, T. (2008). *Designs for an Anthropology of the Contemporary* . Duke University Press. https://books.google.co.id/books/about/Designs_for_an_Anthropology_of_the_Conte.html?id=uLQUe7HdsFEC&redir_esc=y

Rahmawati, F., & Kusmantoro, S. M. (2016). *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Cempaka Putih. http://36.67.108.61/elibrary/index.php?p=show_detail&id=1260

Rahmawati, R., Manda, D., & Babo, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *4*(1). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/484

Ram, A. (1999). *Sosiologi edisi keenam - Jil 1*. Erlangga.

Ritzer, G. (2012). *Handbook Teori Sosial*. Nusa Media. https://lib.ui.ac.id

Saifuddin, A. B. (2006). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. YBP-SP.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1992). *Mikro Ekonomi*. Erlangga . https://onesearch.id/Record/IOS3187.INLIS000000000015562

Septiarti, Hanum, F., Wahyono, S. B., Astuti, S. I., & Efianingrum Ariefa. (2017). *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan* . UNY Press.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana.

Siahaan, J. M. . (2009). *Perilaku Menyimpang : Pendekatan Sosiologi*. Indeks.

Sibeon, R. (2004). Rethinking Social Theory. In *Athenaeum Studi Periodici Di Letteratura E Storia Dell Antichita*. SAGE Publications Ltd.

Sifatu, W. O. (2014). Perubahan, Kebudayaan, dan Agama Dalam Prespektif Antropologi Kekuasaan. *Jurnal Kajian Budaya*, *10 (20)*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajian/article/view/13874/9580

Simmel, G. (n.d.). *The Metropolis and Mental Life*.

Sobirin, A. (1957). *Budaya Organisasi : Pengertian, Makna, dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi* . UPP STIM YKPN. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=294238

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2002). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/sosiologi-suatu-pengantar/

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. https://onesearch.id/Record/IOS6530.ai:slims-3160

Soemardjan, S., & Soelaeman, S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi, Ed. 1*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* . Pustaka Pelajar . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=282338

Sudarma, M. (2008). *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Salemba . https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=5377

Sudarmi, S. (2008). *Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. https://onesearch.id/Record/IOS8185.INLIS000000000016565

Sunarto, & Hartono, A. (2006). *Perkembangan Peserta Didik*. Rineka Cipta. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=671243

Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi* . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. https://lib.ui.ac.id

Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana.

Suyanto, B., & Narwoko, D. (2004). *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan* . Kencana. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=536184

Svalastoga, K., & Alimandan, S. . (1989). *Diferensiasi Sosial*. Bina Aksara. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310717

Tan, M. G., & Soemardjan, S. (1980). *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*. Pulsar. https://lib.ui.ac.id

Thoha, C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.

Weintraub, A. N. (2004). *Power Plays : Wayang Golek Puppet Theatre of West Java*. Ohio University Research in International Studies.

Wirth, L. (1938). Urbanism As A Way Of Life . *The American Journal of Sociology*, *44*. https://www.sjsu.edu/people/saul.cohn/courses/city/s0/27681191Wirth.pdf

Wuradji. (2008). *The Educational Leadership : Kepemimpinan Transformasional* . Gama Media .

https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=45622

Yusuf, I. M. (2017). Etika VS Etiket (Suatu Telaah Tuntutan dan Tuntunan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *3*, 60–78.

PROFIL PENULIS

Depict Pristine Adi merupakan anak pertama dari pasangan Sumiarso Hadi P dan Aryanti. Laki-laki kelahiran Jember, 05 November 1992 ini menempuh pendidikan dasar di kampung halaman, desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tepatnya di SDN Semboro V. Kemudian melanjutkan menimba ilmu di SMP Negeri 3 Tanggul, SMA Negeri 2 Tanggul, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di Kampus Ulul Albab (sebutan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) ia menempuh jalur sarjana di bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemudian Studi Lanjut Magister Program Pascasarjana UNY di bidan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saat ini Depict Pristine Adi merupakan dosen Pendidikan IPS di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis secara mandiri setelah sebelumnya berhasil menerbitkan buku baik secara bersama koleganya, serta berbagai artikel yang dimuat di proseding dan jurnal, baik nasional maupun internasional.

Individu, Masyarakat, dan Institusi *dalam* Pendidikan IPS

Tema NCSS menjadi landasan pengembangan pembelajaran Pendidikan IPS yang bersifat Terpadu dan Tematik. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan IPS secara terpadu terkadang tidak memberikan makna manusia sebagai mahkluk sosial. Konsep Sosiologi yang diinternalisasikan dalam Pendidikan IPS diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang manusia yang bertanggungjawab dan mengetahui sebagai individu yang berada ditengah masyarakat wajib memiliki keterampilan sosial. Menjadi manusia yang memahami adanya lembaga sosial yang mengatur nilai dan norma sosial juga wajib diketahui oleh pendidik dan peserta didik untuk menghindari terjadinya penyimpangan sosial dalam bermasyarakat. Fungsi pengendalian sosial yang dilakukan oleh institusi berupa organisasi masyarakat baik tradisional dan modern juga diharapkan mampu menjadi pemecah masalah sosial dalam masyarakat.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran Pendidikan IPS tema Individu, Masyarakat, dan Institusi dengan baik dan bermakna, mulai dari konsep manusia sebagai individu yang hidup bermasyarakat sampai dengan instutsi sebgai pemecahan masalah kehidupan masyarakat informasi dan net generation di era post-industrial.

Klik Media
Jl. Bromo 302 RT. 1 RW. 3, Kebonagung, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352
kmedia.id
kmedia.id
klikmedialumajang@gmail.com
KlikMedia

ISBN 978-623-363-380-2